

**ANALISIS PENGUNGKAPAN AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN PADA
LAPORAN KEUANGAN
STUDI KASUS : PT PERTAMINA DAERAH OPERASI HULU
JAWA BAGIAN BARAT**



Skripsi

Disusun Oleh :

**Nama : Kunto Noprihantono
NIM : 96212268
Jurusan : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2004**

**ANALISIS PENGUNGKAPAN AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN PADA
LAPORAN KEUANGAN
STUDI KASUS : PT PERTAMINA DAERAH OPERASI HULU
JAWA BAGIAN BARAT**

SKRIPSI

**disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi pada Fakultas
Ekonomi UII**

Oleh :

**Nama : Kunto Noprihantono
No. Mahasiswa : 96212268**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

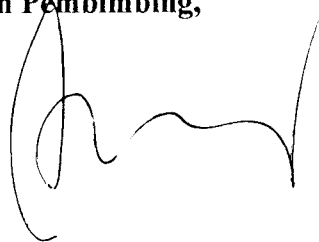
**ANALISIS PENGUNGKAPAN AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN PADA
LAPORAN KEUANGAN
STUDI KASUS : PT PERTAMINA DAERAH OPERASI HULU
JAWA BAGIAN BARAT**

Hasil Penelitian

diajukan oleh

**Nama : Kunto Noprihantono
No. Mahasiswa : 96212268
Jurusan : Akuntansi**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 14 Juni 2005
Dosen Pembimbing,**



(Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si, Ak.)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

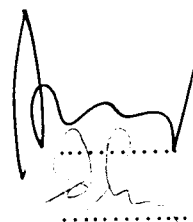
**ANALISIS PENGUNGKAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL
PERUSAHAAN PADA LAPORAN KEUANGAN**

**Disusun Oleh: KUNTO NOPRIHANTONO
Nomor mahasiswa: 96212268**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 16 Juli 2005

Pembimbing Skripsi/Penguji : Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si, Ak

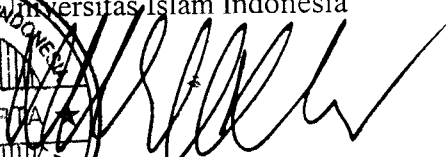
Penguji : Dra. Reni Yendrawati, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA



MOTTO

- ❖ **Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar
(Q.S. Al-Baqoroh: 135)**

- ❖ **Dum Spiro Spero / Dimana ada kemauan disitu ada jalan
(Pepatah)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Kedua orang tuaku, Alm. Bapak H. Soemadji dan Ibu Hj. Siti Ngaidah**
- **Kakak-kakaku, Mbak Wiwit, Mas Wiwis, Mbak Wiwin, Mas Gendon,
dan Mas Antok**
- **Pendampingku, Eva**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGUNGKAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN PADA LAPORAN KEUANGAN STUDI KASUS : PT PERTAMINA DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAT".

Skripsi ini penulis persembahkan kepada almarhum ayahanda, Bapak H. Soemadji dan ibunda Ibu Siti Ngaidah yang telah memberikan doa, dorongan dan kasih sayang kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Ibu Dra. Erna Hidayah, M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si, Ak., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Yang terhormat Bapak Yarmin Lubis, selaku Manajer SDM PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat, Bapak F.X. Suropto, selaku Manajer Keuangan PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat, Bapak M. Priadi, selaku

pembimbing, Ibu MA Yunani, selaku bagian Diklat PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat serta seluruh karyawan PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat yang telah memberikan bahan-bahan dan keterangan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

4. Yang tercinta kakak-kakakku, mbak Wiwit, terutama mas Wiwis, mbak Wiwin, mas Antok (Pakan), mas Gendon dan semua keluarga besar Bapak (alm.) dan Ibu Soemadji atas segala doa dan dorongannya sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Eva Wulandari, SE tersayang atas segala doa, bantuan, dorongan, dan segalanya selama ini.
6. Teman-teman Sambung Rasa I/41, Seturan; keluarga besar di Denggung; teman-teman Akuntansi '96 dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan senantiasa penulis harapkan dari para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 18 Juli 2005

Kunto Noprihantono

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Berita Acara Ujian	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	5

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Latar Belakang Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial	7
2.1.1. Perubahan Tuntutan Masyarakat	7
2.1.2. Perubahan Tanggung Jawab Perusahaan	10
2.1.3. Dasar Pemikiran Pertanggungjawaban Sosial	12
2.2. Pengertian Akuntansi Sosial dan Pengungkapan	13
2.3. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan	17
2.4. Standar Pelaporan Pengungkapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan	19
2.5. Bentuk Pengungkapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan	21
2.6. Penjelasan Mengenai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 03	34

BAB III LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Penemuan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia	37
3.1.1. Masa Kolonial Belanda	37
3.1.2. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia	38
3.2. Lahirnya Unit Pertamina Eksplorasi dan Produksi III	39

3.2.1. Likuidasi Koordinator Wilayah III ke Pimpinan Unit E&P III	40
3.3. Pertamina Operasi Eksplorasi dan Produksi III Karangampel	41
3.4. Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon (DOH Cirebon)	42
3.5. Visi dan Misi Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon	42
3.6. Kegiatan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon	43
3.7. Wilayah Kerja Operasi Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon	45
3.8. Organisasi Perusahaan Daerah Operasi Hulu Cirebon	46
3.9. Data Penelitian	47

BAB IV ANALISIS DATA

4.1. Analisis Data	49
4.1.1. Pertanggungjawaban Sosial di PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat	49
4.1.2. Prosedur Pelaksanaan Aktivitas Pertanggungjawaban Sosial di PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat	53
4.1.3. Pencatatan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial di PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat	54
4.2. Usulan Laporan Pertanggungjawaban Sosial	56
4.3. Keuntungan Penerapan Laporan Pertanggungjawaban Sosial	63

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Laporan Pertanggungjawaban Sosial Inventory Approach	25
Tabel 2.2.	Laporan Pertanggungjawaban Sosial Outlay Cost Approach	27
Tabel 2.3.	Laporan Pertanggungjawaban Sosial Cost Benefit Approach	29
Tabel 2.4.	Laporan Pertanggungjawaban Sosial Program Management Approach	32
Tabel 2.5.	Laporan Pertanggungjawaban Sosial Goal Accounting Approach	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat	70
Lampiran 2.	Laporan Laba Rugi PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat Tahun 2001	72
Lampiran 3.	Laporan Neraca PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat Tahun 2001	74
Lampiran 4.	Laporan Community Development PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat Tahun 2001	77
Lampiran 5.	Laporan Laba Rugi PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat Tahun 2002	79
Lampiran 6.	Laporan Neraca PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat Tahun 2002	81
Lampiran 7.	Laporan Community Development PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat Tahun 2002	84
Lampiran 8.	Laporan Laba Rugi PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat Bulan Januari-September 2003	86
Lampiran 9.	Laporan Neraca PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat Bulan Januari-September 2003	89
Lampiran 10.	Laporan Laba Rugi PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat Bulan Desember 2003	92
Lampiran 11.	Laporan Neraca PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat Bulan Desember 2003	95

Lampiran 12.	Laporan Community Development PT Pertamina DOH	
	Jawa Bagian Barat Tahun 2003	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan sebagai sebuah institusi yang berorientasi pada laba telah memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat, yaitu menyediakan lapangan kerja, produk dan jasa, dan lain-lain.. Di sisi lain, perusahaan mempunyai kewenangan dalam beroperasi secara bebas dan luas. Sebagai konsekuensi, aktivitas dari perusahaan telah menimbulkan dampak negatif terhadap karyawan, lingkungan, konsumen, dan masyarakat luas. Dampak negatif tersebut disebut sebagai externalities.

Kriteria sukses sebuah perusahaan diukur dari kontribusinya kepada masyarakat dan pembangunannya. Masalah ekonomi dan lingkungan berhubungan dekat, dalam hal ini kebijaksanaan perusahaan harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, bukan hanya aspek ekonomi. Membina hubungan baik dengan konsumen, karyawan, dan masyarakat luas memiliki arti penting dan menguntungkan bagi perusahaan. Membina hubungan baik dengan masyarakat lokal sekitar perusahaan, juga memiliki dampak yang baik, dimana perusahaan dapat merekrut sebagian karyawan dari tenaga lokal, selain itu bagi beberapa perusahaan, pasar lokal merupakan pasar utama. Dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial, perusahaan akan meningkatkan kesan atau imej bagus dan menurunkan tingkat resiko kehilangan konsumen.

Kebijaksanaan yang diambil oleh perusahaan harus mempertimbangkan aspek sosial, dimana dalam hal ini ada ketergantungan antara perusahaan dengan masyarakat yang telah memberikan kontribusi kepada perusahaan. Ahmed Bekaoui (1982 : 248) menyatakan bahwa “Pertukaran antara perusahaan dan masyarakat pada utamanya adalah penggunaan sumber sosial. Jika aktivitas perusahaan berakibat pada penurunan sumber sosial, hasilnya adalah *social cost*(biaya sosial), tetapi jika berakibat pada kenaikan sumber sosial hasilnya adalah *social benefit*(manfaat sosial)”. Manfaat sosial memiliki dampak yang positif pada sumber sosial, seperti kenaikan kualitas produksi, kenaikan kesejahteraan karyawan, sumbangan kepada masyarakat, dan lain-lain, sedangkan biaya sosial memiliki dampak negatif terhadap sumber sosial seperti, polusi, pembuangan limbah, kerusakan terhadap sumber daya alam, dan lain-lain.

Menyadari dampak yang timbul terhadap aspek sosial bagi perusahaan, dalam hal ini *social cost*(biaya sosial) dan *social benefit*(manfaat sosial), menimbulkan adanya pengharapan mengenai pertanggungjawaban sosial terhadap para perilaku bisnis. Perusahaan yang dapat memenuhi pengharapan tersebut, memperkenalkan manajemen pertanggungjawaban sosial dan menjadikan pertanggungjawaban sosial sebagai bagian penting dari bisnis., selain itu dengan menerapkan proses akuntansi sosial secara menyeluruh dan transparan akan meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan.

Kesan baik dari masyarakat, terutama dalam lingkungan politik merupakan faktor yang mendorong bagi perusahaan dalam menerapkan

laporan akuntansi sosial. Seperti diketahui bahwa perusahaan besar yang memiliki tingkat kesuksesan tinggi, hampir selalu menarik perhatian masyarakat dan kaum politisi, yang pada gilirannya akan menimbulkan *political cost* (biaya politik) yaitu laporan biaya yang ditanggung oleh perusahaan karena adanya lobby sekelompok masyarakat kepada pemerintah dalam mengatur atau menindak perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. *Political cost* (biaya politik) ini bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan tertentu yang biasanya akan membebani perusahaan, karena merupakan hasil desakan pihak tertentu (masyarakat) melalui pelaporan prestasi sosial yang merupakan bentuk keterlibatan perusahaan dalam masalah sosial, sehingga dalam hal ini perusahaan dapat menghindari adanya *political cost* (biaya sosial) tersebut.

Dalam mengemban tanggung jawab social yang luas, perusahaan menyajikan laporan tahunan mengenai informasi seluruh aktivitas perusahaan secara lengkap. Laporan tahunan konvensional tidak menghitung dan melaporkan masalah eksternal. Seperti pernyataan Ahmed Belkaouri(1982 : 248) “akuntansi keuangan konvensional hanya focus kepada hasil transaksi antara dua atau lebih pihak yang terkait, pertukaran antara perusahaan dan lingkungan sosialnya cenderung dihiraukan.” Baru-baru ini, ilmu akuntansi mempunyai potensi besar untuk berkembang. Menyediakan pengungkapan laporan keuangan non konvensional secara sukarela dalam laporan tahunan telah menjadi bagian penting dari aktivitas bisnis. Pengungkapan yang lengkap, akurat, tepat waktu, objektif, dan mudah dimengerti sangat

diperlukan bagi calon investor dalam membuat suatu keputusan yang rasional. Bagaimanapun juga, penelitian ini akan menganalisa apakah perusahaan menerapkan atau tidak pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban social pada laporan keuangan dan bagaiman perusahaan melaporkannya dalam kondisi nyata.

Dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengambil judul skripsi **“ANALISIS PENGUNGKAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN PADA LAPORAN KEUANGAN: STUDI KASUS PT PERTAMINA DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAT “.**

1.2. RUMUSAN MASALAH.

1. Apakah ada pengeluaran sosial yang dilakukan oleh perusahaan?
2. Apakah perusahaan mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya dalam laporan keuangan?
3. Bagaimana penerapan **interpretasi PSAK no 03** pada perusahaan?

1.3. BATASAN MASALAH

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini akan dibatasi:

1. Penelitian dilakukan di **PT PERTAMINA DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAT.**

2. Penelitian ini menekankan kepada pertanggungjawaban sosial perusahaan yang berkaitan dengan karyawan, masyarakat, konsumen dan lingkungan.
3. Penelitian menggunakan **Interprestasi PSAK no 03** *tentang perlakuan akuntansi atas pemberian sumbangan atau bantuan* sebagai dasar evaluasi.

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengeluaran sosial yang diakui dan diungkapkan oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui bentuk dan isi dari laporan pertanggungjawaban sosial yang dibuat oleh perusahaan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan dari pertanggungjawaban perusahaan dalam menerapkan laporan pertanggungjawaban sosial.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah:

1. Bagi peneliti, melalui penelitian dapat diperoleh wawasan baru mengenai pengetahuan bagaimana menerapkan pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan.
2. Melalui penelitian ini, perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai seberapa jauh kepedulian mereka akan masalah social yang mungkin

timbul didalam masyarakat dan menyampaikannya dalam laporan keuangan.

3. Penelitian ini dapat juga menginformasikan kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap masalah social dan cara penanganan terhadap masalah social.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Latar Belakang Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

2.1.1 Perubahan Tuntutan Masyarakat

Sejak abad ke-20 teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teknologi mutlak diperlukan bagi sebuah sistem ekonomi, dimana mempunyai keinginan akan perkembangan besar dan kemajuan yang lebih besar dengan tujuan meningkatkan produktifitas. Teknologi canggih telah memudahkan aktivitas produktifitas dan sistem informasi, selain itu juga telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi telah menimbulkan beberapa efek negatif bagi lingkungan. Polusi udara, polusi air, limbah industri adalah contoh efek negatif yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menaruh perhatian besar pada tanggung jawab perusahaan akan kerusakan lingkungan.

Pada tahun 1970 dan awal tahun 1980 masyarakat menjadi semakin sadar akan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Masalah tersebut telah merubah tuntutan masyarakat kepada perusahaan. Mereka menolak untuk membeli sebuah produk yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, apakah didalam proses produksi atau dalam penggunaan sehari-hari dan mereka kadang melangkah lebih jauh dengan

menolak menginvestasi uang mereka pada perusahaan yang tidak memperhatikan masalah lingkungan dan sosial.

Tuntutan masyarakat tidak hanya pemenuhan barang dan jasa dan kesempatan kerja, tetapi juga mereka menuntut perusahaan untuk lebih perhatian dan bertanggung jawab untuk setiap masalah lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas operasi perusahaan. Masalah lingkungan dan sosial seharusnya menjadi masalah internal perusahaan dan bukan masalah eksternal, jadi hal tersebut harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan. Masyarakat juga menuntut perusahaan untuk melaporkan dampak dari aktivitas bisnis mereka ke lingkup yang lebih luas, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, konsumen, masyarakat dan kelompok sosial lainnya.

Perubahan tuntutan masyarakat telah menciptakan berbagai bentuk perwujudan, salah satunya adalah kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi pemerintah secara langsung untuk mengontrol aktivitas perusahaan dengan membuat undang-undang lingkungan. Perwujudan lainnya adalah banyak perusahaan besar yang telah membuat laporan pertanggungjawaban sosial secara sukarela. Di Amerika ada lebih dari 100 peraturan yang telah dibuat selama 15 tahun terakhir, diantaranya adalah Clean Water Act, The Clean Air Act, The Resources Conversation dan Recovery Acts tahun 1976, The Comprehensive Environmental Response and Compensation dan Liability Act tahun 1980.

Tanggapan positif dari perusahaan besar dapat dilihat dari penelitian Trotman (1970) dari 100 perusahaan besar di Australia. Penelitian tersebut mengungkap kenaikan jumlah pembuat laporan pertanggungjawaban sosial dari 26 perusahaan di tahun 1967 menjadi 69 perusahaan di tahun 1977. Selain itu hasil penelitian oleh Ernst and Ernst di tahun 1977 pada 500 perusahaan besar di Amerika Serikat menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Trotman. Ditemukan bahwa perusahaan yang membuat laporan pertanggungjawaban sosial telah meningkat dari 57,20% di tahun 1972 menjadi 91,20% di tahun 1976 (Jusuf, 1989:47-48).

Menurut studi pada tahun 1996 yang dilakukan oleh KPMG di Swedia, sebuah perusahaan internasional akuntansi publik, sejak tahun 1993 prosentase dari 100 top perusahaan di 12 negara pemimpin industri menyebutkan bahwa laporan lingkungan di dalam laporan tahunan telah meningkat dua kali menjadi 69 persen (Rogerson, 1996:58). Helen dan Gary (2001:152) menambahkan bahwa 23 persen perusahaan telah membuat laporan lingkungan yang terpisah, dibandingkan pada tahun 1993 yang hanya 13 persen. Sebagian besar pengungkapan (*disclosure*) masih bersifat sukarela and bersifat non keuangan dengan hanya 18 persen dari perusahaan pada studi yang memasukkan biaya lingkungan kedalam laporan keuangan atau catatan dan/atau membahas kebijakan keuangan mengenai perhitungan biaya tersebut.

2.1.2 Perubahan Tanggung Jawab Perusahaan

Sebuah perusahaan adalah sebuah institusi masyarakat yang penting karena berhubungan dengan aktivitas manusia sebagai sumber kehidupan. Keputusan yang dibuat oleh perusahaan mempunyai efek yang sangat jauh bagi masyarakat. Di masa lalu, banyak keputusan perusahaan semata-mata berdasarkan analisa keuntungan biaya (*a cost benefit analysis*) dan bagaimana memaksimalkan laba. Keputusan yang seperti itu dapat menimbulkan eksternalitis (*externalities*) negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atas tindakan mereka. Cheeseman (2000:27) menyatakan bahwa pandangan tradisional dari pertanggungjawaban sosial sebuah bisnis adalah bisnis yang seharusnya memaksimalkan laba bagi para pemegang saham. Pandangan tersebut yang mendominasi bisnis dan hukum selama abad 19 yang berpendapat bahwa kepentingan pihak lain (karyawan, masyarakat di sekitar lokasi tempat bisnis, pemasok) tidaklah penting dan bagi dan oleh mereka.

Rob dan Jan (2001:160) menyatakan bahwa:

Minat akan akuntansi sosial dan lingkungan telah ada selama dua puluh tahun, tetapi karakter dari akuntan yang konservatif telah membawa kepada keengganan untuk mengakui sebagai bagian dari orthodox subyek (*orthodoxy subject*). Meningkatnya kesadaran akan masalah lingkungan telah membawa kepada minat yang baru akan prosedur akuntansi yang baru bagi organisasi dan interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan.

Negara-negara maju yang telah mencapai kemajuan dalam pengembangan ekonomi dan bisnis telah menunjukkan perubahan sikap akan motif memaksimalkan laba dan kepentingan pribadi. Perubahan konsep dari

pemaksimal laba (*profit maximizer*) menjadi pemuas laba (*profit satisfier*) atau dari kepentingan pribadi menjadi kepentingan kelompok sebenarnya memakan waktu yang lama. Didalam pemuas laba (*profit satisfier*), pertanggungjawaban manajemen perusahaan telah berkembang tidak hanya kepada pemilik dan para pemegang saham, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

Pengungkapan informasi non tradisional (sosial dan lingkungan) oleh perusahaan telah mengalami peningkatan cukup tajam selama beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun juga, ada kenaikan fakta-fakta bahwa kesiapan yang lebih besar untuk membuat pengungkapan (*disclosures*) dimotivasi oleh tujuan untuk mencukupi keinginan perusahaan yang didorong oleh beberapa kelompok penting didalam masyarakat; atau bahkan untuk mengontrol pesan yang diterima oleh bermacam-macam stakeholders. Matthews (2001:3) menyatakan bahwa:

Dukungan akan kebutuhan untuk menerbitkan informasi mengenai dampak lingkungan didalam laporan tahunan oleh sebagian perusahaan muncul karena dorongan oleh sebagian kecil masyarakat yang merasa berpengaruh (kadang dipanggil masyarakat kuat) dan biasanya didorong oleh kejadian atau berita tertentu. Hal ini jauh dari informasi ideal yang tersedia dan disukai, pengungkapan yang diharapkan bagi semua pihak dan dimotivasi oleh penerimaan dari kontrak sosial sebuah bisnis dengan masyarakat atau kebutuhan untuk menyesuaikan dengan peraturan dan strategi yang disenangi oleh kelompok *stakeholders* yang lebih luas.

2.1.3 Dasar Pemikiran Pertanggungjawaban Sosial

Akuntansi dapat berarti sebagai sebuah aktivitas untuk menyediakan informasi kepada pembuat keputusan dan pengontrol aktivitas ekonomi. Dari pengertian tersebut, telah terbukti bahwa akuntansi berhubungan dengan tingkah laku dan mengikuti perubahan situasi lingkungan. Kecenderungan yang tidak dapat diingkari adalah informasi yang disajikan sebagian besar bersifat kuantitatif informasi. Bagaimanapun juga, jika perusahaan menganalisa lebih jauh dinamisasi perkembangan masyarakat tidak hanya kebutuhan akan kuantitatif informasi, tetapi juga kualitatif.

Ralph Estes (1995:329) melaporkan bahwa perusahaan berbicara keras dan penuh kekuatan melalui iklan dan agen mereka, mengenai keuntungan yang telah mereka sediakan bagi masyarakat. Tetapi mereka jarang berbicara mengenai kerusakan yang mereka lakukan, biaya sosial dari perusahaan swasta. Laporan laba rugi perusahaan hanya menunjukkan biaya yang diinternalkan oleh perusahaan. Laporan laba rugi tidak menghitung biaya-biaya yang tidak dikompensasi bagi masyarakat, *the external diseconomics*.

Disisi lain, perkembangan yang lebih besar dari industri perusahaan telah menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara langsung diluar kepentingan pemilik modal. Berdasarkan hal tersebut, secara tidak langsung masyarakat telah memberikan sebuah tanggung jawab kepada perusahaan, sehingga perusahaan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban sosial perusahaan mempunyai karakter tersendiri yang tidak ditampilkan didalam

laporan keuangan konvensional. Laporan keuangan konvensional diamsusikan tidak lagi menyajikan aktivitas perusahaan secara lengkap.

2.2. Pengertian Akuntansi Sosial dan Pengungkapan

Pada awalnya akuntansi hanya sebagai prosedur untuk memproses data keuangan yang kemudian berkembang dan menjadi sebuah jenis aktivitas jasa yang diberikan oleh akuntan kepada pembuat keputusan. Seperti Horngern dan Harrison (1995:4) nyatakan didalam buku mereka:

“Akuntansi adalah sebuah sistem yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat keputusan.”

Setiap perusahaan mempunyai *stakeholders* yang lain yang mempunyai hak akan informasi dan mereka mempunyai kebutuhan akan informasi yang lebih luas dari sekedar kegiatan keuangan perusahaan. Akuntansi sosial cenderung memperhatikan aktivitas penyediaan informasi mengenai aktivitas sosial dan lingkungan bagi semua *stakeholders* dan dampaknya bagi perusahaan.

Ahmed Belkaoui dalam bukunya, *Accounting Theory*, juga membahas mengenai akuntansi sosial yang disebut juga *socioeconomic accounting* (akuntansi sosioekonomi). Belkaoui memberikan definisi dari akuntansi sosial, salah satu cabang akuntansi, sebagai proses penataan, pengukuran dan pengungkapan timbal balik yang timbul antara sebuah perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Lebih lanjut, Belkaoui menyatakan bahwa akuntansi

sosial adalah sebuah ungkapan dari pertanggungjawaban sosial perusahaan, karena bagaimanapun juga perusahaan mendapat nilai tambah dari kontribusi masyarakat di sekitar perusahaan termasuk dari penggunaan sumber sosial (social resources). Jika aktivitas perusahaan menyebabkan kerusakan sumber sosial maka dapat timbul biaya sosial (*social cost*); jika menyebabkan kenaikan sumber sosial maka dapat timbul keuntungan sosial (*social benefit*) (Belkaoui, 1981:248).

Matthews dan Perera (1996:377-378) telah mengklasifikasikan berbagai macam akuntansi sosial, sebagai berikut:

- a. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (*Social Responsibility Accounting*)
- b. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial adalah pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan, kuantitatif dan kualitatif mengenai aktivitas perusahaan. Contohnya, pengungkapan mengenai karyawan, produk, pemakaian energi, pencegahan polusi dan aktivitas yang mendukung masyarakat.
- c. Total Dampak Akuntansi (*Total Impact Accounting*)
- d. Total Dampak Akuntansi adalah mengenai jumlah keseluruhan dampak perusahaan terhadap lingkungan. Untuk mengetahui dampak tersebut perlu diukur biaya publik dan swasta.
- e. Akuntansi Sosioekonomi (*Socioeconomics Accounting*)
- f. Akuntansi Sosioekonomi adalah proses pengevaluasian aktivitas pendanaan publik menggunakan hitungan keuangan/finansial

dan non finansial. Keseluruhan aktivitas harus dievaluasi dengan pandangan untuk membuat keputusan mengenai nilai dari pengeluaran yang diambil dalam hubungannya dengan hasil yang dicapai.

- g. Akuntansi Indikator Sosial (*Social Indicators Accounting*)
- h. Akuntansi Indikator Sosial dipakai untuk menggambarkan pengukuran peristiwa makro sosial dalam hal menentukan objektif dan menaksir luas dimana hal tersebut dicapai.
- i. Akuntansi Sosietal (*Societal Accounting*)
- j. Akuntansi Sosietal dipakai oleh beberapa penulis sebagai saran bentuk akuntansi yang menggabungkan semua bentuk lain kedalam meta teori.

Menurut Gernon dan Meek (2001:70) istilah *disclosure* (pengungkapan), dalam jangkauan yang lebih luas, menekankan pada pelepasan setiap bagian dari informasi mengenai sebuah perusahaan. Hal tersebut termasuk yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan, warta berita, koran, majalah, dan lain-lain. Selain itu, *disclosure* (pengungkapan) berkaitan dengan informasi didalam laporan tahunan yang mendukung laporan keuangan.

Disclosure (pengungkapan) didalam laporan keuangan sering digolongkan sebagai baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan. Gernon dan Meek (2001:71) menyatakan bahwa pengungkapan yang bersifat keuangan terdiri atas informasi yang bersifat kuantitatif dalam bentuk

moneter. Sebagai contoh, perusahaan melaporkan inventaris pada neraca (*balance sheet*) dan menunjukkan pada catatan kaki jumlah barang jadi (*finished goods*), berapa jumlah bahan material (*raw material*), dan lain-lain. Mereka menggolongkan pengungkapan non keuangan sebagai naratif deskripsi, kenyataan atau pendapat yang bukan berdasarkan hitungan moneter. Contoh yang terdahulu adalah sebuah pernyataan misi perusahaan. Sebuah contoh di masa sekarang adalah data mengenai jumlah karyawan pada setiap negara tempat perusahaan beroperasi.

Disclosure (pengungkapan) dapat dibedakan berdasarkan apakah mereka diminta atau disarankan, atau apakah mereka dilaporkan secara sukarela. Karena laporan keuangan adalah alat yang paling utama untuk menarik minat masyarakat akan kegiatan perusahaan, pengungkapan dapat memperluas lingkup minat akan sebuah perusahaan dengan cara memperluas penguasaan laporan keuangan. *Disclosure* (pengungkapan) adalah sebuah masalah yang substantif, karena masalah yang diungkap berpotensi mempengaruhi keputusan atau tindakan masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan sukarela seharusnya dibuat kapanpun isi dari informasi mempunyai potensi untuk mempengaruhi keputusan dari pemakai laporan keuangan.

Menurut Gernon dan Meek (2001:73) apa, berapa banyak dan bagaimana sebuah perusahaan mengungkap informasi tambahan bervariasi tergantung pada permintaan standar akuntansi, kebutuhan pemakai, pengaruh dari pemakai dan filosofi manajemen perusahaan.

2.3. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk menyediakan kualitas barang dan jasa yang bermutu baik kepada masyarakat, memelihara kualitas lingkungan sosial dan memberi kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sebuah perusahaan dikatakan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan ketika manajemennya mempunyai visi didalam aktivitas operasionalnya, bukan hanya memaksimalkan laba, tetapi juga memperbaiki kondisi lingkungan dan sosialnya.

Tujuan dari akuntansi sosial adalah untuk mengukur keuntungan sosial (*social benefit*) dan biaya sosial (*social cost*) sebagai hasil dari aktivitas perusahaan dan untuk menampilkan pencapaian perusahaan. Keuntungan dan biaya sosial tidak selalu diukur dalam bentuk moneter, sehingga tidak mempengaruhi bentuk laporan akuntansi.

Lebih jauh, Mathews dan Perera (1996:378) menyatakan tiga level pengukuran yang bisa ikut dimasukkan dalam pengembangan akuntansi sosial, yang disarankan oleh AAA dalam laporan Komite Biaya Sosial (*Committee on Social Costs*) pada 1975.

- Level I, dimana aktivitas perusahaan diidentifikasi dan digambarkan. Sebagai contoh adalah pengidentifikasian barang-barang polusi yang dapat dimasukkan kedalam biaya lingkungan.
- Level II, dimana aktivitas perusahaan dihitung menggunakan unit non moneter. Bahan-bahan yang menimbulkan polusi diukur

berdasarkan angka pelepasan limbah, pengaturan aliran dan pemenuhan akan standar yang sudah ada.

- Level III, dimana dilakukan usaha untuk mengukur efek dari pelepasan polusi. Pengukuran tersebut diubah kedalam perkiraan keuangan akan biaya dan keuntungan yang dapat dipakai oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan (*stakeholders*).

Akuntansi sosial muncul karena kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat. Sebuah perusahaan mempunyai perjanjian yang tidak tertulis untuk memberi keuntungan sosial bersih (*net social benefit*) kepada masyarakat. Keuntungan sosial bersih (*net social benefit*) adalah selisih antara kontribusi perusahaan kepada masyarakat dan penipisan sumber daya yang disebabkan oleh perusahaan. Masyarakat memberikan wewenang untuk memiliki dan menggunakan tanah dan sumber daya alam dan manusia.

Berdasarkan adanya kontrak sosial yang menghasilkan akuntansi sosial, tujuan dari akuntansi sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengukur kontribusi perusahaan kepada masyarakat lokal yang tidak hanya termasuk biaya dan keuntungan dalam perusahaan, tetapi juga biaya dan keuntungan diluar perusahaan dari segmen sosial yang berbeda.
2. Menentukan apakah strategi perusahaan mengenai sumber daya manusia konsisten disatu sisi dengan prioritas sosial dan permintaan perseorangan disisi yang lain.

3. Menyediakan informasi mengenai tujuan, kebijakan, program dan prestasi perusahaan dalam segala aspek sosial, juga kontribusi perusahaan pada tujuan sosial.

2.4. Standar Pelaporan Penungkapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Tidak ada standar pelaporan yang baku mengenai pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan, oleh karena itu bentuk laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Ada dua macam pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang bisa dipakai oleh perusahaan, sebagai berikut:

- Pengungkapan didalam laporan keuangan tahunan tetapi diluar laporan keuangan.
- Pengungkapan melalui laporan sosial yang tersendiri yang biasanya diterbitkan sebagai sebuah buku yang terpisah dan/atau diterbitkan melalui internet.

Meskipun tidak ada standar yang baku mengenai pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan, standar pelaporan akuntansi konvensional tetap harus dipakai. Dalam akuntansi keuangan konvensional ada 4 kualitatif karakteristik laporan keuangan sebagai standar pembuatan laporan keuangan. Keempat kualitatif karakteristik tersebut adalah dapat dimengerti, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan (IAI, 1996:6-11).

Adapun penjelasan 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Karakteristik kualitatif yang pertama adalah dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimaksudkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
- 2) Karakteristik kualitatif yang kedua adalah relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengevaluasi hasil mereka dimasa lalu.
- 3) Karakteristik kualitatif yang ketiga adalah keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus handal. Informasi memiliki kualitas handal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai

penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

- 4) Karakteristik kualitatif yang keempat adalah dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relative. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

2.5. Bentuk Pengungkapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Para ahli ekonomi telah mengajukan beberapa alternatif bentuk pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan. Tidak ada standar yang baku mengenai pelaporan pengungkapan sosial. Keuntungan dan biaya sosial tidak dapat selalu diukur nilainya dan dinyatakan dalam bentuk uang, jadi hal tersebut mempengaruhi bentuk dan metode laporan akuntansi.

Perusahaan dapat membuat model laporan pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial menurut cara mereka sendiri atau mengadopsi

beberapa panduan yang diajukan oleh beberapa organisasi non pemerintah. Menurut Parker, Ferris dan Otley (Sri Murni, 2001:166-169) ada beberapa model alternatif pelaporan keuangan sehubungan dengan dampak social yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan, sebagai berikut: (1) Inventory approach, (2) Outlay cost approach, (3) Cost benefit approach, (4) Program management approach, (5) Goal accounting approach.

1. Inventory Approach

Dampak sosial, baik positif maupun negatif diungkapkan dalam bentuk diskripsi. Pengungkapan dalam satuan moneter dilakukan bila data tersedia. Problem utama dari pendekatan ini adalah kurangnya kuantifikasi terhadap dampak sosial. Ilustrasi dari Pendekatan Inventaris (Inventory Approach) dapat dilihat pada tabel 2.1. (Sri Murni, 2001:166).

2. Outlay Cost Approach

Pendekatan ini melihat dari sudut pandang perusahaan, yaitu dengan cara mengungkapkan berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan pertanggungjawaban sosial yang dilakukannya dengan membagi ke dalam kategori tertentu. Para pengguna laporan keuangan dapat melakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Pendekatan ini tidak berorientasi kepada constituent perusahaan, sehingga tidak mengungkapkan berapa manfaat sosial dan biaya sosial yang timbul bagi mereka.

Ilustrasi dari pendekatan ini dapat dilihat pada tabel 2.2. (Sri Murni, 2001:166-167).

3. Cost Benefit Approach

Unsur-unsur yang dilaporkan adalah manfaat sosial dan biaya sosial yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Pendekatan ini dipandang lebih memadai dari kedua pendekatan sebelumnya, karena memungkinkan untuk dibandingkan antara manfaat sosial dan biaya sosial. Sehingga dapat diperkirakan berapa manfaat sosial dan biaya sosial yang timbul. Pada tabel 2.3. dapat dilihat ilustrasi dari Pendekatan Manfaat Biaya (Cost Benefit Approach) (Sri Murni, 2001:167-168).

4. Program Management Approach

Pendekatan ini mencoba menggambarkan upaya yang dilakukan dan hasil yang dicapai dari program sosial perusahaan. Laporan menyajikan out-lay cost dari dampak sosial tertentu, sasaran program, dan mengevaluasi apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Hasil yang dicapai disajikan secara naratif dan kuantitatif. Ilustrasi untuk pendekatan ini dapat dilihat pada tabel 2.4. (Sri Murni, 2001:169).

5. Goal Accounting Approach

Model ini merupakan variasi model *program management approach* yang mengasumsikan bahwa organisasi menyusun

tujuan operasional, finansial, dan tujuan sosial. Ilustrasi dari pendekatan ini dapat dilihat pada tabel 2.5. (Sri Murni, 2001:169).

Tabel 2.1.

Laporan Pertanggungjawaban Sosial Per Periode Akhir Akuntansi Inventory Approach
<p>1. Pekerjaan</p> <p>Positif</p> <ul style="list-style-type: none">• Perluasan operasi telah menyediakan 826 pekerjaan selama dua belas bulan terakhir• Konsultasi pension telah dimulai pada tahun terakhir di semua divisi <p>Negatif</p> <ul style="list-style-type: none">• Fluktuasi permintaan telah menyebabkan ketidakpastian di seksi tertentu dari pegawai produksi• Hubungan industri yang sempit masih terjadi di divisi A
<p>2. Produk</p> <p>Positif</p> <ul style="list-style-type: none">• Prosedur <i>quality control</i> telah ditingkatkan• Garansi barang hasil produksi telah diperluas dan ditingkatkan <p>Negatif</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengaduan pelanggan tentang pelayanan produk meningkat selama tahun terakhir• Aspek-aspek tertentu dari produk divisi A tidak aman dan membutuhkan pengujian ulang

3. Lingkungan Sosial

Positif

- Rp xxx telah diinvestasikan untuk peralatan pencegahan polusi untuk divisi A
- Beberapa bangunan di divisi A dicat kembali untuk meningkatkan penampilan dan daya tahan

Negatif

- Peralatan pengawas polusi air yang dipasang di divisi A mengalami kegagalan dan tidak dapat berfungsi menurut peraturan pengendali polusi Negara

Tabel 2.2.

Laporan Pertanggungjawaban Sosial Per Periode Akhir Akuntansi Outlay Cost Approach		
Personal Outlay	200x	200y
Sumbangan pensiun	Rp xxx	Rp xxx
Asuransi pekerjaan	xxx	xxx
Pelayanan kesehatan	xxx	xxx
Tunjangan hari raya	xxx	xxx
Subsidi sewa rumah	xxx	xxx
Training pekerjaan	xxx	xxx
	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> Rp xxx	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> Rp xxx
 Consumer Outlay		
Garansi perbaikan pekerjaan	Rp xxx	Rp xxx
Riset dan pengembangan	xxx	xxx
Pendidikan pelanggan	xxx	xxx
	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> Rp xxx	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> Rp xxx

Environmental-Related Outlay		
Pengendalian polusi	Rp xxx	Rp xxx
Pengembangan wilayah dan bangunan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
	Rp xxx	Rp xxx
 Community Service Outlay		
Sumbangan yayasan amal	Rp xxx	Rp xxx
Iuran perkumpulan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
Total	<u><u>Rp xxx</u></u>	<u><u>Rp xxx</u></u>

Tabel 2.3.

Laporan Pertanggungjawaban Sosial	
Per Periode Akhir Akuntansi	
Cost Benefit Approach	
SOCIAL BENEFIT	
Untuk Pekerja	
Peningkatan gaji	Rp xxx
Peningkatan sumbangan untuk pension	Rp xxx
Ansuransi kesehatan	Rp xxx
Pelatihan pekerja	Rp xxx
	<hr/>
	Rp xxx
Untuk konsumen	
Pengurangan harga penjualan	Rp xxx
Proses baru	Rp xxx
Penurunan biaya perbaikan yang dibebankan konsumen	Rp xxx
	<hr/>
	Rp xxx
Untuk komunitas	
Sumbangan untuk yayasan	Rp xxx
Peralatan dan fasilitas yang disewa oleh pihak luar	Rp xxx

Pelatihan pekerja ahli	Rp xxx
	<hr/>
	Rp xxx
Untuk lingkungan	
Biaya pemasangan alat pengendali polusi	Rp xxx
Biaya penghijauan sekitar perusahaan	Rp xxx
	<hr/>
	Rp xxx
Total Social Benefit	Rp xxx
 SOCIAL COST	
Untuk pekerja	
Sakit yang berhubungan dengan pekerjaan	Rp xxx
Upah lembur yang belum dibayar	Rp xxx
	<hr/>
	Rp xxx
 Untuk konsumen	
Pengurangan nilai jual kembali produk yang ditukar	Rp xxx
Biaya keamanan tambahan yang tidak ditambah pada produk	Rp xxx
	<hr/>
	Rp xxx
 Untuk lingkungan	
Biaya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui	Rp xxx
Perkiraan biaya pembuangan sampah	Rp xxx

Biaya persediaan air lokal	<u>Rp xxx</u>
	<u>Rp xxx</u>
Total Sosial Cost	<u>Rp xxx</u>
Social Benfit / Sosial Cost Bersih	<u>Rp xxx</u>

Tabel 2.4.

Laporan Pertanggungjawaban Sosial Per Periode Akhir Akuntansi Program Management Approach		
Diskripsi pekerjaan	: Kesehatan dan keamanan tempat kerja	
Tujuan program	: Untuk mengurangi kejadian karena kecelakaan dan penyakit	
Outlay cost	200x	200y
Keamanan pada pelatihan kerja	Rp xxx	Rp xxx
Pemasangan alat pencegah kecelakaan	xxx	xxx
Pendidikan anti rokok	xxx	xxx
Gaji pegawai keamanan	xxx	xxx
Staf perawatan dan pencegahan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Total	Rp xxx	Rp xxx
Hasil		
Kehilangan jam kerja karena kecelakaan berkurang dari 2550 (200x) menjadi 2250 (200y).		
Kehilangan jam kerja karena penyakit berkurang dari 1250 (200x) menjadi 985 (200y).		
Jumlah pekerja yang merokok berhasil dikurangi 15%		

Tabel 2.5.

Laporan Pertanggungjawaban Sosial

Per Periode Akhir Akuntansi

Goal Accounting Approach

Financial and Social Operating Result								
Division	Sales Volume	Product Cost	Average Sales Price	Inventory Level	Product Safety	Environ-mental Impact	Health and Safety	Equal Opportu-nity
A	0	*	0	0	0	*	*	0
B	*	0	0	*	0	0	0	0
C	0	0	0	0	1	0	*	*
D	0	0	0	0	0	*	0	0

* = Result below tolerance level of planning figure
0 = Result within or above tolerance level of planning figure

2.6. Penjelasan Mengenai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 03

Standar akuntansi keuangan merupakan pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan untuk tujuan pelaporan kepada para pemakai di dalam dan luar manajemen perusahaan. Standar akuntansi keuangan disusun dengan tujuan agar laporan keuangan dapat dimengerti, dapat diperbandingkan, relevan serta tidak menyesatkan para pemakai laporan keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun standar akuntansi keuangan. Melalui Komite Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia telah berhasil menyusun Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Komite Standar Akuntansi Keuangan juga selalu berupaya mengembangkan dan menyempurnakan Standar Akuntansi Keuangan agar sejalan dengan tuntutan perkembangan dunia usaha dan perkembangan standar akuntansi internasional.

Dalam upaya mengembangkan dan menyempurnakan Standar Akuntansi Keuangan, Komite Standar Akuntansi Keuangan telah menerbitkan beberapa Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. Salah satunya adalah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 3 tentang interpretasi mengenai perlakuan akuntansi atas pemberian sumbangan atau bantuan. *Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 3, pemberian sumbangan atau bantuan dilaporkan sebagai beban pada laporan laba rugi selama*

periode waktu berjalan, kecuali jika pemberian sumbangan atau bantuan berhubungan dengan kepemilikan sebuah aktiva.

Pemberian sumbangan dan bantuan sendiri sifatnya merupakan kegiatan sosial yang dilakukan secara sukarela dan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 3, setiap kegiatan sebuah perusahaan yang sifatnya pemberian sumbangan atau bantuan seharusnya dilaporkan sebagai beban didalam laporan laba rugi. Dengan dilaporkannya pemberian sumbangan atau bantuan sebagai beban didalam laporan laba rugi, maka perusahaan secara tidak langsung telah melaporkan pertanggungjawaban sosialnya di dalam laporan keuangan.

Dalam menjalankan usahanya, dapat terjadi bahwa perusahaan memberikan sumbangan atau bantuan kepada pihak lain atau masyarakat. Sehubungan dengan sumbangan atau bantuan tersebut, timbul pertanyaan, apakah suatu sumbangan atau bantuan merupakan beban atau distribusi laba, dan kapan pemberian suatu sumbangan atau bantuan diakui dalam laporan keuangan.

1. Sumbangan atau bantuan diakui sebagai beban dan dalam penetapan laba rugi bersih periode berjalan, kecuali apabila pemberian sumbangan atau bantuan tersebut berkaitan dengan perolehan suatu aktiva
2. Apabila pemberian suatu sumbangan atau bantuan berkaitan dengan perolehan suatu aktiva, maka sumbangan atau bantuan

tersebut merupakan bagian dari biaya perolehan aktiva yang bersangkutan

3. Pemberian suatu sumbangan atau bantuan diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual. Saat terjadinya pemberian suatu sumbangan atau bantuan adalah pada saat kondisi tertentu yang disyaratkan untuk pemberiaan sumbangan atau bantuan telah terpenuhi atau bila transaksi tertentu yang mendasarinya telah dilakukan atau pada saat dijanjikan atau dibayarkan.

BAB III

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Penemuan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Eksplorasi minyak di Indonesia pertama kali dilakukan di daerah Jawa Barat di desa Cibodas, Kecamatan Maja, Majalengka di kaki Gunung Ceremai oleh dua orang Belanda, yaitu *Jan Reeving*, dan *Van Hoevel* pada tahun 1871. Namun pencarian sumber minyak tersebut tidak menunjukkan hasil yang positif, walaupun di daerah tersebut banyak terdapat “*Oil Seepages*” atau rekahan tanah yang mengandung minyak. Secara komersial, sumber minyak bumi di Indonesia ditemukan oleh *Aeiko Janzoon Zijker*, seorang pengusaha perkebunan tembakau di daerah Telaga Tunggal, Sumatra Utara pada tanggal 15 Juni 1885.

3.1.1. Masa Kolonial Belanda

Ketika Indonesia masih di bawah pemerintahan colonial Belanda, daerah perminyakan di Jawa merupakan konsesi perusahaan Belanda yaitu *NV de Bataafsche Petroleum My(NV de BPM)*. Pada masa tersebut telah dilakukan beberapa penyelidikan oleh *NV de BPM* seperti :

- Penyelidikan geologi lapangan di daerah Purwakarta, Cirebon, Kerawang, dan Subang sekitar tahun 1910-1942.
- Penyelidikan gaya berat lapangan di daerah Kerawang, Bekasi, Indramayu, Purwakarta, Cirebon, dan Majalengka.

- Pemboran eksplorasi di daerah Indramayu, Kerawang, dan Majalengka pada tahun 1932-1941

3.1.2. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, daerah perminyakan di Jawa dikuasai oleh Perusahaan Minyak Tambang Nasional (*PMTN*) yang berkedudukan di Cepu Jawa Tengah. Pada tahun 1948 *PMTN* diubah menjadi Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (*PTMR*), yang pada tahun itu juga daerah perminyakan di Jawa dikuasai kembali oleh *NV de BPM* hingga habis masa konsesinya pada tahun 1960. Setelah habis masa konsesinya *NV de BPM*, kegiatan relokasi tambang dan minyak di Jawa dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tahun 1961 melalui peraturan pemerintah No. 199/1961 didirikan PN Permigan yang ditugaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengurus kegiatan perminyakan di Jawa dengan kantor pusat di Jakarta. Pada tahun 1962, PN Permigan melalui langkah-langkah persiapan dengan menghidupkan kembali usaha perminyakan di Jawa, yang antara lain usahanya merehabilitasi sumur minyak di lapangan Randegan, Bongas, dan Majalengka. Kantor lapangan Randegan pada waktu itu, berkedudukan di Bongas Kabupaten Majalengka dikenal dengan istilah Daerah Adminitrasi Wilayah (DAW) Cirebon.

3.2. Lahirnya Unit Pertamina Eksplorasi dan Produksi III

Pada bulan Januari 1966 melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No. SKPTS 61/M/Migas/1966, PN Permigan dibubarkan. Kemudian melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Minyak dan Gas Bumi No. SKPTS/124/M/Migas/1966 tanggal 24 Maret 1966, daerah perminyakan PN Permigan diserahkan kepada *PN Pertamina*. Tanggal 26 Maret 1966, PN Pertamina memiliki beberapa unit eksplorasi dan produksi, diantaranya adalah unit eksplorasi dan produksi (E&P) III dengan daerah kerja yang meliputi Jawa dan Madura yang merupakan daerah perminyakan tua eks *NV de BPM* dan *SHELL* yang dianggap tidak memiliki prospek lagi.

Produksi minyak lapangan di daerah Jatibarang langsung diekspor ke Jepang melalui pelabuhan khusus Balongan (Indramayu) yang juga dikirim ke unit pengolahan IV Cilacap, sedangkan produksi minyak lapangan Cepu langsung dikirim ke kilang PPT migas Cepu. Sebagai tindak lanjut dari penyelidikan seismic, maka pada bulan Oktober 1968 dilaksanakan pemboran eksplorasi yang diolah oleh Pertamina dilapangan Jatibarang, di mana sumur pertama tersebut dikenal dengan nama sumur Jatibarang-42 (JT-42). Pada tahun 1975, Pertamina unit III telah diubah menjadi wilayah III dengan wilayah kerja meliputi pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian wilayah Kalimantan Selatan dengan kantor pusat yang berkedudukan di JL Kramat Raya No 59 Jakarta.

3.2.1. Likuidasi Koordinator Wilayah III ke Pimpinan Unit E&P III

Masa kepemimpinan korwil III yang dulunya merupakan satuan unit III tidak berlangsung lama, pada tanggal 29 Agustus 1981 terjadi likuidasi dari korwil III kepada pimpinan unit eksplorasi dan produksi III (E&P III) dengan wilayah kerja meliputi pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur. Mengingat daerah operasi Pertamina unit E&P III sebagian besar berada di lapangan Jatibarang, maka sesuai kebijakan Direktur Utama Pertamina yang berkaitan dengan efisiensi di segala bidang, maka sejak tanggal 1 Juli 1982 kantor pusat unit eksplorasi dan produksi III di pindahkan ke Cirebon. Dengan demikian kantor lapangan Jatibarang yang semula berada di Cirebon (Daerah Administrasi Wilayah Cirebon), juga mengalami kepindahan yaitu ke Mundu, Kabupaten Indramayu.

Dengan makin berkembangnya lokasi panas bumi Kamojang, maka untuk memperlancar urusan operasi maupun administrasi sejak tanggal 20 Januari 1983 lokasi Kamojang menjadi kantor lapangan panas bumi Kamojang dan berkedudukan di Desa Pangkalan, Kecamatan Ibnun, Kabupaten Bandung. Setelah PN Permigan dilikuidasi pada tahun 1966, maka kilang Cepu dan lapangan sekitarnya dijadikan pusat pendidikan dan latihan minyak dan gas bumi (Pusdiklat Migas) yang merupakan bagian dari Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Pada bulan Maret 1984 nama Pusdiklat Migas diubah menjadi Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT Migas).

Sejak tanggal 23 Februari 1988, lapangan migas Cepu dan sekitarnya diserahkan pengelolaanya dari PPT Migas kepada Pertamina, dan terhitung mulai tanggal 1 April 1988 Direksi Pertamina melimpahkan pengelolaanya kepada Unit Eksplorasi dan Produksi III (UE&P III).

3.3. Pertamina Operasi Eksplorasi dan Produksi III Karangampel

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi tantangan masa depan, Pertamina melakukan restrukturisasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 070 tanggal 11 Mei 1994, dilakukan upaya pembenahan organisasi di seluruh unit dan daerah kerja Pertamina. Sebagai salah satu realisasinya, sejak tanggal 1 April 1995, Pertamina UEP III diubah menjadi Pertamina Eksplorasi dan Produksi Karangampel. Lapangan produksi migas Karangampel ditiadakan dan dilebur menjadi bagian langsung dari Pertamina operasi eksplorasi dan produksi Karangampel yang sampai dengan saat ini berkedudukan di Cirebon.

Pertamina lapangan produksi migas di Cepu yang semula di bawah unit UEP III Cirebon diubah menjadi Pertamina operasi eksplorasi dan produksi Cepu dan langsung bertanggungjawab kepada divisi produksi di Jakarta. Pertamina lapangan panas bumi Kamojang yang semula di bawah unit UEP III diubah menjadi area produksi panas bumi Kamojang yang langsung bertanggungjawab kepada divisi panas bumi Pertamina pusat. Program restrukturisasi organisasi di Pertamina berdasarkan Surat Keputusan No. 070

tanggal 11 Mei 1994 tersebut direncanakan akan memakan waktu selama 5 (lima) tahun

3.4. Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon (DOH Cirebon)

Sejalan dengan perubahan organisasi di tingkat pusat dan juga berdasarkan surat edaran General Manager(GM) DOH Cirebon No. E-001/D. 4000/2001-SO tanggal 19 Maret 2001 tentang perubahan sebutan Daerah Operasi Hulu Karangampel serta dengan mengacu memorandum General Manager(GM) kepada direktur hulu No. 190/D. 4000/2001-SO tanggal 1 Februari 2001 tentang usul perubahan edaran tersebut merubah sebutan Organisasi Daerah Operasi Hulu Karangampel menjadi Daerah Operasi Hulu Cirebon.

3.5. Visi dan Misi Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon

3.5.1. Visi

1) Umum

“ Menjadi perusahaan yang unggul, maju, dan terpadang ”

2) Khusus

“ Menjadi unit usaha Pertamina yang efisien, unggul, maju, dan mandiri ”

3.5.2. Misi

1) Umum

- Melakukan usaha dalam bidang energi dan petrokimia.

- Merupakan entitas bisnis yang dikelola secara profesional, kompetitif, dan berdasarkan tata nilai unggulan.
- Memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, pelanggan, pekerja, dan masyarakat serta mendukung perekonomian nasional

2) Khusus

Melaksanakan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi terutama di Indonesia serta secara selektif di dunia internasional dengan tujuan :

- Menjadi perusahaan yang kuat dan sehat.
- Menghasilkan keuntungan bagi Pertamina.
- Berprestasi setaraf dengan perusahaan terbaik sejenisnya.

Dalam melaksanakan usaha Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon selalu berdasarkan pada tata nilai unggulan yang :

- Berstandar internasional
- Berwawasan lingkungan
- Menimbulkan kebanggaan dan mengembangkan profesionalisme karyawan

3.6. Kegiatan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon

Jenis kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon adalah sebagai berikut

- 1) Penyelidikan seismic darat adalah suatu usaha untuk mengetahui apakah ada sumber minyak dan gas.

- 2) Pemboran eksplorasi migas (darat) adalah untuk membuktikan hasil dari penyelidikan seismic.
- 3) Pengembangan lapangan migas (pemboran pengembang) adalah kegiatan untuk menambah sumur migas dan menambah kapasitas produksi.
- 4) Pemasangan pipa transmisi minyak dan gas bumi.
- 5) Operasi produksi adalah kegiatan untuk mengeluarkan minyak dan gas bumi dari dalam bumi.

Hasil dari kegiatan eksplorasi dan produksi Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon selalu bervariasi yaitu antara 12.735 barrel/hari untuk minyak dan 352,06 MM SCFD untuk gas bumi (data tanggal 22 Maret 2004). Jumlah produksi diatas adalah dihasilkan dari 118 sumur minyak dan gas bumi produksi yang aktif, sedangkan total jumlah sumur minyak dan gas bumi yang sudah dibor dan di eksplorasi oleh Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon adalah 437 sumur minyak dan gas bumi. Untuk sejumlah sumur minyak dan gas bumi yang tidak diproduksi, dikarenakan berstatus

- Ditinggalkan.
- Pengamatan.
- Ditangguhkan .
- Tunggu fasilitas produksi (data Mei 2004).

3.7. Wilayah Kerja Operasi Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon

Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon memiliki wilayah kerja yang meliputi Jawa Barat dan sebagian Jawa Timur, dan dibagi atas tiga area operasi yang meliputi

1) Area Operasi Asset I dengan wilayah kerja

- Jatibarang
- Randegan
- Sindang
- Sindang Barat
- Waled Utara
- Cemara Selatan
- Cemara Barat
- Cemara Timur
- Tugu Barat
- Pasir Catang
- Kendanghaur Timur
- Gantar

2) Area Operasi Asset II dengan wilayah kerja

- Pamanukan
- Pegaden
- Pasir Jadi
- Sindang Sari
- Cicauh
- Tambun
- Cilamaya Utara
- Cilamaya Selatan
- Sukamandi
- Tanjung Sari
- Rangasdengklok
- Subang
- Bojonggarong

3) Area Operasi Transmisi Gas dengan wilayah kerja

- Jawa Barat
 - ❖ St Kompresor Mundu
 - ❖ St Kompresor Kendanghaur
 - ❖ St Kompresor Cilamaya
 - ❖ St Kompresor Tegal Gede
 - ❖ St Kompresor Bitung
- Jawa Timur
 - ❖ St Kompresor Porong
 - ❖ PLN Gresik
 - ❖ Petrokimia Putra

3.8. Organisasi Perusahaan Daerah Operasi Hulu Cirebon

Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon saat ini dipimpin oleh seorang

General Manager dengan membawahi tiga unsur yaitu :

1) Tiga manager asset

- Asset I
- Asset II
- Transmisi gas

2) Lima chief

- Chief Operasional
- Chief Produksi
- Chief Gas

- Chief Reservoir
- Chief Geologi

3) Enam fungsi penunjang

- Bagian umum
- Teknik
- Logistik
- HPL
- Keuangan
- Fungsi Inspektorat daerah

Dalam operasi sehari-hari, Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon mempunyai 694 orang untuk karyawan tetap yang tersebar diseluruh wilayah operasi kerja, dibantu dengan 2370 orang tenaga kontrak. Tenaga kerja Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon pada umumnya telah mempunyai pengalaman kerja rata-rata 15 tahun sampai dengan 25 tahun (sebagian besar berpengalaman kerja diatas 15 tahun). Sedangkan pekerja kontrak berpengalaman kerja antara 3 tahun sampai dengan 8 tahun, mengingat system kerjanya secara kontrak maka sering terjadi perubahan tenaga kerja.

3.9. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

1. Data umum yang meliputi, sejarah, perkembangan perusahaan, struktur organisasi, dan informasi lain yang diperoleh dari perusahaan yang mendukung penelitian

2. Data khusus yang meliputi laporan keuangan perusahaan, dan laporan pertanggungjawaban social perusahaan (community development) yang akan dianalisis pada bab IV. (dapat di lihat pada lampiran).

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1. Analisis Data

PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat merupakan salah satu unit eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi PT Pertamina yang memiliki wilayah kerja meliputi Jawa Barat dan sebagian Jawa Timur. Sebagai unit eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat mempunyai kegiatan operasional utama, yaitu pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi dari dalam bumi dan pemasangan pipa transmisi sebagai sarana penyaluran minyak dan gas bumi dari unit eksplorasi dan produksi menuju unit pengolahan. Untuk kegiatan pengolahan hasil eksplorasi minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh unit pengolahan dimana unit tersebut terpisah dari PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat.

4.1.1. Pertanggungjawaban Sosial di PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat dapat diketahui bahwa PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat telah melakukan pertanggungjawaban sosial. Pertanggungjawaban sosial yang telah dilaksanakan sebagian besar terkait dengan masyarakat, baik itu masyarakat lokal maupun masyarakat umum.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan ditunjukkan melalui beberapa aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat dan program-programnya dalam mengatasi permasalahan sosial sebagai akibat dari aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan. Aktivitas sosial yang dilakukan telah menimbulkan beberapa pengeluaran sosial (*social expenditures*) yang harus ditanggung oleh PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat. PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat telah memasukkan pengeluaran sosial dalam laporan keuangan dan dicatat sebagai biaya.

Wilayah operasional PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat berada di tengah wilayah pemukiman masyarakat luas, sehingga setiap aktivitas utamanya tidak pernah lepas dari masalah sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Adanya penggusuran dan pembongkaran pemukiman penduduk dan sarana umum, dalam hal ini sarana pendidikan dan ibadah merupakan tanggung jawab sosial PT Pertamina. Seperti yang terjadi pada beberapa wilayah operasi kerja PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, yaitu Cemara Selatan, Gantar, dan Kandang Haur. Penggusuran dan pembongkaran pemukiman penduduk dan sarana umum terpaksa dilakukan karena tepat pada daerah tersebut terdapat sumber minyak dan gas bumi yang untuk selanjutnya akan dibangun fasilitas pengeboran dan pendistribusian minyak dan gas bumi. Adapun pemukiman penduduk dan sarana umum yang digusur dan dibongkar hanya yang berada dalam radius 2,5 km dari lokasi pengeboran dan pendistribusian minyak dan gas bumi. Hal

tersebut sesuai dengan aturan keamanan yang ada di setiap wilayah operasi kerja unit eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi PT Pertamina, dimana dalam jarak radius 2,5 km setiap fasilitas pengeboran dan pendistribusian minyak dan gas bumi harus bebas dari wilayah pemukiman masyarakat.

Melihat kondisi tersebut dan sebagai rasa tanggung jawab sosial, maka PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat telah memberikan kompensasi kepada masyarakat, yaitu berupa pemberian ganti rugi akibat penggusuran, pemindahan pemukiman masyarakat, pendirian sarana pendidikan dan ibadah, pembangunan jalan dan sarana umum lainnya pada sebuah wilayah yang telah disepakati oleh PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat dan masyarakat. Aktivitas sosial PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat tidak hanya berhenti pada pemberian kompensasi, tetapi juga terus dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Aktivitas sosial yang berkaitan dengan masyarakat tersebut dinamakan dengan Community Development Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat. Kegiatan program Community Development tidak hanya terkait dengan masyarakat lokal tetapi juga masyarakat umum. Community Development Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat terbagi dalam lima program, yaitu sarana ibadah, pendidikan dan olahraga, peringatan hari besar agama Islam dan nasional, sosial dan fasilitas. Sementara itu, Community Development Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat mencakup daerah wilayah operasi kerja PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, yaitu:

- a. Kota Cirebon
- b. Kabupaten Cirebon
- c. Kabupaten Indramayu
- d. Kabupaten Subang
- e. Kabupaten Majalengka
- f. Kabupaten Karawang
- g. Kabupaten Bekasi
- h. Kota Bekasi
- i. Kota Bandung
- j. Kabupaten Kuningan
- k. Sidoarjo
- l. Jakarta

Semua kegiatan Community Deveopment Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik antara PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat dan masyarakat di sekitar wilayah operasi kerja PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, selain itu juga bertujuan untuk memenuhi fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat mempunyai sarana penyaluran kegiatan yang positif.

4.1.2. Prosedur Pelaksanaan Aktivitas Pertanggungjawaban Sosial di PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat

Aktivitas pertanggungjawaban sosial PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, Community Development Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, merupakan tanggung jawab Divisi Hubungan Masyarakat PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat. Adapun prosedur pelaksanaannya adalah :

1. Divisi Hubungan Masyarakat melakukan survey lapangan pada masyarakat di sekitar wilayah operasi kerja PT Pertamina Operasi Hulu Jawa Bagian Barat.
2. Membuat laporan mengenai hasil survey lapangan, dimana akan diperoleh data mengenai kegiatan sosial yang diperlukan oleh masyarakat dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan sosial tersebut.
3. Menyerahkan hasil laporan survey lapangan kepada General Manager PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat untuk dipelajari lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan.
4. Laporan yang telah disetujui oleh General Manager PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat dibuat rangkap dua. Rangkap yang pertama diserahkan kepada bagian keuangan sebagai prosedur pencairan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan sosial. Rangkap yang kedua disimpan oleh Divisi Hubungan Masyarakat sebagai berkas administrasi.

5. Divisi Hubungan Masyarakat melaksanakan kegiatan operasional program Community Development secara langsung dilapangan. Setelah pelaksanaan program Community Development selesai, Divisi Hubungan Masyarakat membuat laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi program Community Development Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat (lihat lampiran)

4.1.3. Pencatatan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial di PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat

PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat telah mencatat biaya yang dikeluarkan untuk program Community Development di dalam laporan keuangan sebagai biaya produksi. Biaya sosial tersebut tidak dilaporkan secara langsung di dalam laporan keuangan. Sehingga, laporan keuangan PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat tidak secara langsung menginformasikan kepada para pemakai mengenai pengeluaran sosial yang telah dikeluarkan untuk mengatasi masalah sosial.

PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat hanya mempunyai kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat, hal ini disebabkan karena kegiatan utama PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat hanya eksplorasi dan pendistribusian minyak dan gas bumi, untuk pengolahan diserahkan kepada unit pengolahan, dimana unit tersebut terpisah dari PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat. Sehingga PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat tidak memiliki biaya

sosial untuk pengolahan limbah, dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab unit pengolahan. Pengolahan limbah sebagai hasil dari aktivitas operasional terkait dengan pertanggungjawaban sosial terhadap lingkungan.

Sedangkan biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk karyawan, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, beasiswa bagi anak karyawan yang berprestasi, tidak menjadi tanggung jawab PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, melainkan tanggung jawab PT Pertamina pusat yang berada di Jakarta. Gaji karyawan, berbagai tunjangan dan biaya sosial untuk karyawan dibayar langsung oleh PT Pertamina pusat Jakarta sehingga tidak dilaporkan ke dalam laporan keuangan PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat.

Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh dari PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi untuk pengeluaran sosial PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat tidak sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 3 mengenai Interpretasi Perlakuan Akuntansi Atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan. Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 3, pemberian sumbangan atau bantuan dilaporkan sebagai beban pada laporan laba rugi selama periode waktu berjalan, kecuali jika pemberian sumbangan atau bantuan berhubungan dengan kepemilikan sebuah aktiva.

Program Community Development Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat yang merupakan program pemberian sumbangan dilaporkan di dalam laporan keuangan PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat

sebagai biaya produksi bukan sebagai beban, sebagaimana yang sudah diatur dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 3. PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat melaporkan biaya Program Community Development sebagai biaya produksi karena timbulnya masalah sosial terkait dengan jalannya aktivitas produksi di PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, sehingga biaya untuk penanganan masalah sosial tersebut masuk ke dalam biaya produksi dalam laporan keuangan.

Program dan aktivitas yang telah dijelaskan diatas membuktikan bahwa PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat sangat peduli dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat telah mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk mengatasi masalah sosial. Bagaimanapun juga, semua aktivitas sosial tersebut menguntungkan bagi perusahaan dan perusahaan harus melaporkannya, sehingga semua pihak dalam dan luar perusahaan mengetahui aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan perhatian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya.

4. 2. Usulan Laporan Pertanggungjawaban Sosial

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat telah melaksanakan pertanggungjawaban sosial dengan baik, hal ini dapat dilihat adanya laporan pengeluaran sosial, yaitu laporan Community Development yang dibuat dan dilaporkan secara terpisah dari laporan

keuangan. Akan tetapi pengeluaran sosial tersebut dicatat sebagai biaya produksi bukan sebagai beban sosial di dalam laporan keuangan. Sehingga, laporan keuangan PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat tidak menginformasikan secara langsung dan terperinci mengenai jumlah pengeluaran sosial.

Untuk mengungkap pertanggungjawaban sosialnya, PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat dapat membuat catatan didalam laporan keuangan yang melaporkan besarnya jumlah pengeluaran sosial (Community Development), atau menyertakan laporan Community Development sebagai lampiran pada laporan keuangan. Pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial (laporan Community Development) tidak akan mempengaruhi atau merubah laporan keuangan PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, karena hanya mengungkapkan pengeluaran sosial masyarakat secara terperinci yang telah dicatat dalam laporan keuangan.

PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat telah menyatakan kepedulian mereka akan masalah sosial yang terjadi di sekitar wilayah operasi kerja PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat dengan mengadakan beberapa aktivitas sosial melalui program Community Development. PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat telah membuat laporan biaya Community Development yang terpisah dari laporan keuangan. Tetapi PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat tidak secara langsung mengungkap jumlah pengeluaran sosial tersebut didalam laporan keuangan.

Untuk mengungkap pertanggungjawaban sosial yang telah dilaksanakan, PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat dapat membuat laporan pertanggungjawaban sosial yang lebih terperinci, bukan hanya melaporkan biaya kegiatan yang sudah dikeluarkan. Untuk memutuskan pendekatan (*approach*) laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial, PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat dapat menggabungkan *Cost Benefit Approach* (Pendekatan Manfaat Biaya) dengan *Inventory Approach* (Pendekatan Inventaris). Dalam Pendekatan Manfaat Biaya bentuk laporan pertanggungjawaban sosial terdiri atas Manfaat Sosial (*Social Benefit*) dan Biaya Sosial (*Social Cost*). Manfaat dan Biaya Sosial yang terkait dengan pihak masyarakat, baik masyarakat lokal maupun umum.

Manfaat sosial adalah manfaat ekonomis dan sumber sosial sebagai hasil dari aktivitas operasi perusahaan dan mempunyai dampak yang positif atau meningkatkan sumber-sumber sosial. Manfaat sosial untuk masyarakat lokal adalah program perusahaan untuk mendukung aktivitas masyarakat lokal. Program tersebut dapat berupa sumbangan rutin, penyediaan sarana ibadah, penyediaan sarana olahraga dan lain-lain. Manfaat sosial untuk masyarakat umum adalah menjadi sponsor dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak luar perusahaan.

Biaya sosial adalah sumber-sumber sosial yang digunakan oleh perusahaan didalam kegiatan operasional dan menyebabkan kerugian. Untuk masyarakat lokal, biaya sosial adalah biaya pemakaian fasilitas yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat di sekitar wilayah operasi kerja.

Sementara itu untuk masyarakat umum, biaya sosial adalah biaya atas pemakaian fasilitas umum.

Perbedaan antara manfaat sosial dan biaya sosial akan menghasilkan total manfaat sosial/biaya sosial. Total manfaat sosial/biaya sosial adalah pendapatan sosial bersih (*net social income*) atau kerugian pada sumber sosial yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan.

Pendekatan (*approach*) yang kedua dari pembuatan laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah pendekatan inventaris (*inventory approach*), yang terdiri dari informasi mengenai jenis-jenis kegiatan pertanggungjawaban sosial yang terkait dengan masyarakat, baik masyarakat lokal maupun umum. Informasi yang dilaporkan adalah informasi yang bersifat kuantitatif.

Dibawah ini adalah laporan pertanggungjawaban sosial yang diusulkan oleh peneliti yang dapat digunakan oleh PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat berdasarkan pendekatan manfaat biaya dan pendekatan inventaris:

1. Laporan Pertanggungjawaban Sosial dengan menggunakan Pendekatan Manfaat Biaya

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)

Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat

Laporan Pertanggungjawaban Sosial

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2003

I. MANFAAT SOSIAL

I.1. Manfaat Sosial untuk Masyarakat Lokal

a. Sarana Ibadah	Rp 58,900,000
b. Sarana Pendidikan dan Olahraga	Rp 97,820,000
Total Manfaat Sosial untuk Masyarakat Lokal	Rp 156,720,000

I.2. Manfaat Sosial untuk Masyarakat Umum

a. Peringatan Hari Besar Islam dan Nasional	Rp 155,375,000
Total Manfaat Sosial untuk Masyarakat Umum	Rp 155,375,000
TOTAL MANFAAT SOSIAL	Rp 312,095,000

II. BIAYA SOSIAL

II.1. Biaya Sosial untuk Masyarakat Lokal

a. Sosial	Rp 441,712,273
Total Biaya Sosial untuk Masyarakat Lokal	Rp 441,712,273

II.2. Biaya Sosial untuk Masyarakat Umum

a. Fasilitas	Rp	500,000
Total Biaya Sosial untuk Masyarakat Umum	Rp	500,000
TOTAL BIAYA SOSIAL	Rp	442,212,273
TOTAL MANFAAT SOSIAL/BIAYA SOSIAL		(Rp 130,117,273)

2. Laporan Pertanggungjawaban Sosial dengan menggunakan Pendekatan Inventaris

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)

Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat

Laporan Pertanggungjawaban Sosial

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2003

PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat telah memenuhi pertanggungjawaban sosialnya dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan sosial melalui Program Community Development yang dapat dikategorikan menjadi lima bagian:

1. Sarana Ibadah

Kegiatan sosial yang terkait dengan sarana ibadah, adalah pemberian sumbangan untuk pembangunan mesjid, perbaikan fasilitas sarana ibadah, pemberian perlengkapan sarana ibadah (kitab suci Al-Qur'an, karpet, pengeras suara, dan lain-lain).

2. Pendidikan dan Olahraga

Untuk segi pendidikan, yaitu pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu di sekitar wilayah operasi kerja PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat. Sedangkan untuk kegiatan olahraga, meliputi pembangunan fasilitas dan prasarana olahraga di pemukiman sekitar wilayah operasi kerja PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat.

3. Peringatan Hari Besar Agama Islam dan Nasional

Setiap tahunnya, bangsa Indonesia merayakan lima hari besar agama dan memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Sebagai partisipasi dan rasa solidaritas terhadap masyarakat sekitar dan untuk memeriahkan peringatan tersebut, maka PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat memberikan bantuan dalam bentuk uang maupun hewan Qurban pada peringatan hari raya Idul Adha kepada masyarakat yang tinggal di sekitar daerah wilayah operasi kerja.

4. Sosial

Kegiatan sosial program Community Development lebih ditujukan untuk masyarakat lokal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah bantuan perbaikan jalan raya. Dengan adanya kegiatan perbaikan jalan akan menguntungkan PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat sekaligus masyarakat di sekitarnya.

5. Fasilitas

Bantuan pengadaan penerangan jalan di wilayah operasi kerja PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat yang berkaitan dengan pemenuhan fasilitas bagi masyarakat umum.

4.3. Keuntungan Penerapan Laporan Pertanggungjawaban Sosial

Pengungkapan pengeluaran sosial adalah langkah yang bagus bagi perusahaan untuk menunjukkan perhatian mereka terhadap masalah sosial yang terjadi di lingkungan wilayah operasi kerja mereka. Perusahaan yang membuat laporan pertanggungjawaban sosial dan mengungkap pengeluaran sosial akan mendapat manfaat lebih daripada yang tidak melakukannya, karena pemenuhan pertanggungjawaban sosial dapat dilihat oleh pihak luar dan mereka akan memberikan penghargaan lebih kepada perusahaan yang tidak hanya memikirkan laba. Selain itu, laporan pertanggungjawaban sosial akan menaikkan kepercayaan dari pihak luar, seperti investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat.

Masyarakat mungkin tidak membaca seluruh laporan pertanggungjawaban sosial, tetapi masyarakat dapat melihatnya melalui media massa (*news release*) yang memuat laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Melalui itu, perusahaan akan mendapat respon positif dan akan mampu menciptakan lingkungan yang baik untuk mendukung aktivitas

operasional perusahaan. Dengan kata lain, keberadaan dan reputasi perusahaan secara langsung berhubungan dengan kepedulian perusahaan akan masalah social.

Laporan pertanggungjawaban sosial adalah bagian atau pelengkap laporan keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan sebagai media penyampaian kepedulian perusahaan akan masalah sosial yang lebih relevan dan transparan. Laporan pertanggungjawaban sosial akan meningkatkan kesan dan nama baik perusahaan, selain simpati dari pihak lain/luar.

Keuntungan yang lain adalah perusahaan dapat menghindari biaya politik yang mungkin dapat terjadi. Biaya politik (*political cost*) adalah biaya yang dapat terjadi dan harus menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai hasil dari lobi (mencoba mempengaruhi) yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat kepada pemerintah, sebagai sanksi terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan. Sanksi tersebut dapat berupa peraturan atau undang-undang yang menjadi tanggung jawab perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Setelah menganalisa data-data dan laporan keuangan PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat secara terprinci, peneliti sampai pada beberapa kesimpulan yang diambil berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan teori-teori yang berhubungan:

1. PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat telah melakukan berbagai kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat, baik masyarakat lokal maupun umum. Aktivitas sosial tersebut menggambarkan kepedulian PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat yang besar akan kondisi dan permasalahan sosial dalam lingkup wilayah operasi kerja. PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat telah membuat laporan aktivitas pertanggungjawaban sosial secara terpisah dari laporan keuangan, yaitu laporan Community Development Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat. Tetapi PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat tidak secara langsung mengungkapkan pengeluaran aktivitas pertanggungjawaban sosial dalam laporan keuangan dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan *interpretasi PSAK No 3*. Sehingga para pemakai laporan keuangan tidak mengetahui jumlah pengeluaran aktivitas pertanggungjawaban sosial yang

telah dikeluarkan oleh PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat.

2. Masalah sosial merupakan permasalahan yang sangat penting dan memerlukan perhatian yang besar dari masyarakat, terutama ketika timbul sebagai hasil dari aktivitas perusahaan. Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi masalah sosial tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat dan mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosial yang menginformasikan berbagai aktivitas dalam mencegah dan mengatasi permasalahan sosial. Laporan pertanggungjawaban sosial mengungkapkan pengeluaran (*expenditure*) dan menjelaskan aktivitas sosial perusahaan selama satu periode akuntansi.
3. Dengan mengungkapkan pengeluaran (*expenditure*) sosial melalui laporan pertanggungjawaban sosial, perusahaan memperoleh beberapa keuntungan, seperti mendapat simpati dan respon positif dari masyarakat, menciptakan kesan yang baik bagi perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah dimana akan menumbuhkan lingkungan yang bagus guna mendukung aktivitas operasional perusahaan. Keuntungan yang diperoleh sangat penting bagi perusahaan dalam mempertahankan kegiatan operasional baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

5.2. Saran

Di bawah ini adalah beberapa saran yang diberikan oleh peneliti setelah memberikan beberapa kesimpulan berkaitan dengan analisa peneliti:

1. PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat seharusnya membuat laporan pertanggungjawaban sosial secara lebih terperinci. Laporan pertanggungjawaban sosial tersebut seharusnya melaporkan jenis-jenis kegiatan dan jumlah pengeluaran untuk masing-masing kegiatan sosial. Bentuk dari laporan tersebut dapat berupa laporan kuantitatif dan kualitatif seperti yang disarankan oleh peneliti. Sehingga laporan pertanggungjawaban sosial akan menginformasikan kepada pembaca lebih lengkap mengenai aktivitas sosial perusahaan.
2. Laporan pertanggungjawaban sosial yang disarankan oleh peneliti hanya sebuah contoh laporan pertanggungjawaban sosial yang dapat dipergunakan oleh PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat. PT Pertamina Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat dapat juga membuat laporannya sendiri sesuai dengan kondisi dan aktivitas perusahaan, karena belum ada standar baku mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan.
3. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai sebuah asosiasi yang bertugas mengembangkan Standar Akuntansi, peneliti merekomendasikan supaya ada peraturan yang lebih terperinci mengenai perlakuan akuntansi untuk kegiatan sosial, karena sejauh ini kegiatan sosial yang diperhatikan hanya mengenai pemberian sumbangan atau donasi. Selain itu Ikatan Akuntan Indonesia seharusnya mengembangkan peraturan mengenai pengungkapan aktivitas sosial sebuah perusahaan dan pengeluarannya.

DAFTAR PUSTAKA

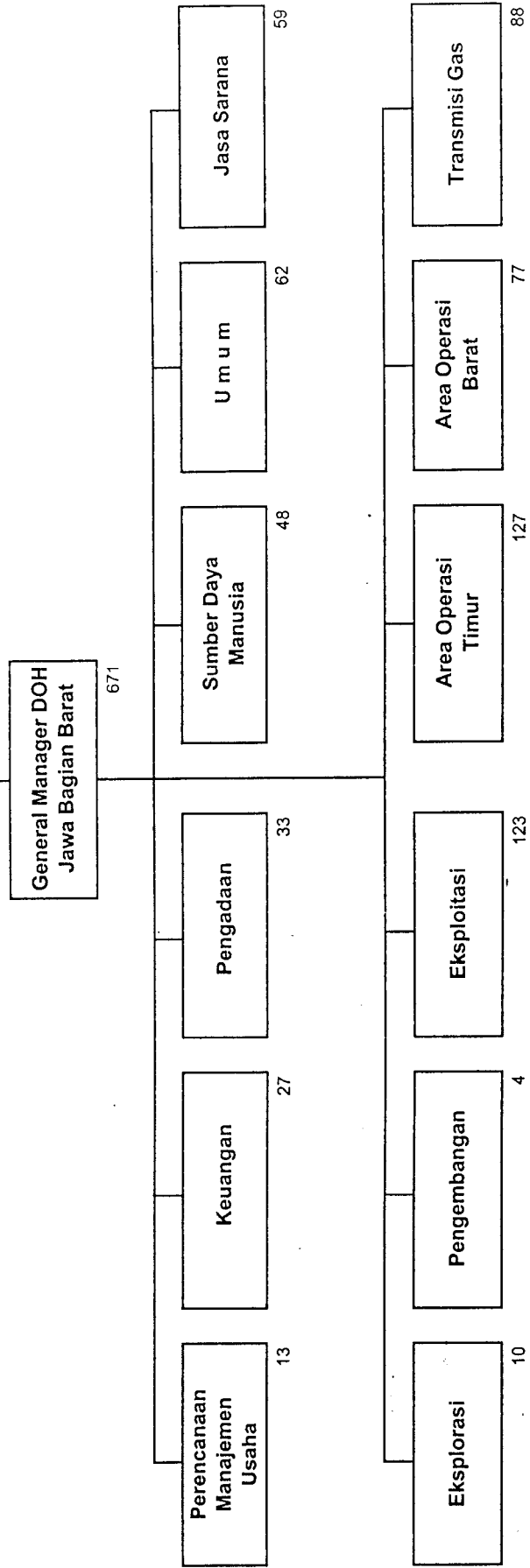
- Belkaoui, Ahmed, *Accounting Theory*, Harcourt Brace Jovanich, Inc., New York, 1981.
- Cheeseman, Henry R., *The Legal and Regulatory Environment Contemporary Perspective in Business*, 2nd ed., Prentice Hall, Inc., New Jersey, 2000.
- Estes, Ralph, *The Public Cost of Private Corporations*, *Advances in Public Interest Accounting*, Vol VI, pp. 329-351, 1995.
- Gernon, Helen dan Meek, Gary K., *Accounting: An International Perspective*, 5th ed., International Edition, The Mc Graw Hill Companies, Inc., New York 2001.
- Gray, Rob dan Bebbington, Jan, *Accounting for the Environment*, 2nd ed., SAGE Publications, Ltd., London, 2001.
- Hornigern, Charles T. dan Harrison, Walter T., Jr, *Accounting*, 3 ed., International Edition, Prentice Hall, New Jersey 1995.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan. As 1 June 1996*, Penerbit Salemba Empat, Indonesia, 1996.
- Mathews, M.R. dan Perera, M.H.B., *Accounting Theory and Development*, 3rd ed., International Thomson Publishing, Australia, 1996.
- Matthews, Reg., *Structures for Non-traditional Accounting Disclosures in the 21st Century*, Aston University, UK, 2001.
- Murni, Sri *Akuntansi Sosial: Suatu Tinjauan Mengenai Pengakuan, Pengukuran dan Pelaporan Externalities Dalam Laporan Keuangan*, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 2, no. 1, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Rogerson, P., *Greening the Global Village*, *The Corporate Accountant*, p. VIII, November 1996.

Wibisana, Jusuf M., *Akuntansi Sosial: Evolusi Dalam Sejarah Akuntansi*,
Akuntansi, No. 4, Hal:47-48, April 1989.

Lampiran 1

Struktur Organisasi PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat

Deputi Dir Hulu



Lampiran 2

Laporan Laba Rugi PT Pertamina DOH Jawa Bagian

Barat Tahun 2001



(P E R T A M I N A)
DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAT

Judul : **L A B A R U G I (TERMASUK GAS JATIM)** 1 - 01
 Periode : **01 Januari S/D. 31 Desember 2001 (Audited)** Laporan 0 0 1
Current

No Baris	Nama Rekening	Kode Laporan	TAHUN BERJALAN (Desember 2001)	TAHUN LALU (Des 2000 Audited)	Perubahan (a - b)	
					Rp.(juta)	%
	P E N D A P A T A N					
01	Penjualan dalam negeri BBM	002				
02	Penggantian biaya BBM dari pemerintah	003				
03	Penjualan dalam negeri bukan BBM	004	(6.327.012.345.156)	(4.377.819.943.004)	1.949.192	45
04	Eksport minyak mentah	005A				
05	Eksport Hasil Minyak	005B				
06	Eksport L N G	005C				
07	Retensi dari Kontrak Bagi Hasil	006				
08	Lain - lain	007	(16.222.409.632)	(17.235.135.357)	(1.013)	(6)
09	Jumlah Pendapatan		(6.343.234.754.787)	(4.395.055.078.361)	1.948.180	41
	BIAYA - BIAYA					
10	Pembelian Minyak Mentah/ Hasil Minyak/ Gas	008	2.100.898.950.095	1.486.876.576.793	614.022	41
11	Eksplorasi	009	2.491.624.747	-	2.492	#DIV/0!
12	Produksi ✓	009	- 886.510.251.752	329.083.676.768	557.427	169
13	Pengolahan	009	-			
14	Pembekalan Dalam Negeri	009	-			
15	Pengangkutan Laut dan Telekomunikasi	009	-			
16	Selish Kurs	010A	(124.994.782.148)	(139.216.680.114)	14.222	- (100)
17	Bunga	011	2.122.654.511	302.054.641.387	(299.932)	(99)
18	Penyusutan, Deplesi dan Amortisasi	022	174.244.891.195	112.379.859.990	61.865	55
19	Jumlah Biaya		3.041.273.590.151.70	2.091.178.074.823	950.096	45
	La b a / R u g i		(3.301.961.164.636)	(2.303.877.003.538)	998.084	43

MENGETAHUI :
 BPKP PERWAKILAN PROP JAWA BARAT
 PENGENDALI TEKNIS.

Drs. SHIN WAN

Cirebon, 22 Feb 2002
 KEU DOH JAWA BAGIAN BARAT

MANAGER

F.X. SURIPTO

Lampiran 3

Laporan Neraca PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat

Tahun 2001



(P E R T A M I N A)
DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAT

II - 01
Laporan : 021

Judul Laporan : N E R A C A
Per : 31 Desember 2001 (Audited)

No. Baris	Keterangan	Kode Laporan	TAHUN BERJALAN (Desember 2001)	TAHUN LALU (Des 2000 Audited)	Perubahan (a-b)	
					Rp. (Juta)	%
1	AKTIVA					
2	AKTIVA LANCAR					
3	Kas dan Bank	029	6.108.041,990	9.582.459,066	(3.474)	(36,26)
4	Surat-surat Berharga	029	-	-	-	-
5	Piutang Dagang	025	799.740.394,372	803.234.882,147	(3.494)	(0,44)
6	Penyisihan piutang dagang	025	(29.987.165,718)	(72.825.675,572)	42.839	(58,85)
7	Piutang lain-lain	025	6.600.924,209	328.967.886,500	(322.367)	(97,99)
8	Penyisihan piutang lain-lain	025	(311.756,020)	(212.744,167)	991	(46,51)
9	P E R S E D I A N					
10	Minyak mentah dan hasil minyak	024	33.599.263,305	15.393.151,070	18.206	-
11	M a t e r i a l	023	62.358.918,040	64.788.523,948	(2.430)	(3,75)
12	Pembayaran dimuka	025	3.909.529,110	7.032.908,548	(3.123)	(44,11)
13	JUMLAH AKTIVA LANCAR		882.038.149,288	1.155.961.191,540	(273.923)	(23,70)
14	Investasi					
15	AKTIVA TETAP					
16	Eksplorasi					
17	Produksi	022	3.115.169.242,022	2.874.264.029,563	240.905	8,38
18	P e n g o l i a h a n	022	-	-	-	-
19	LNG					
20	Pembekalan dan pemasaran dalam negeri	022	-	-	-	-
21	Perkapalan keabandaran dan Komunikasi	022	-	-	-	-
22	Lain-lain					
23						
24	Akumulasi Depresiasi dan Deplesi	022	(1.325.473.175,966)	(1.194.631.697,878)	130.841	10,95
25	Nilai Buku Aktiva Tetap		1.789.696.066,055	1.679.632.331,685	110.064	6,55
26	Pekerjaan dalam pelaksanaan (WIP)	022	127.186.516,530	118.991.018,151	8.195	6,89
27	JUMLAH AKTIVA TETAP		1.916.882.582,585	1.798.623.349,836	118.259	6,57
28						
29	Aktiva lain-lain	026	59.952.886,562	50.893.605,265	9.059	17,80
30	JUMLAH AKTIVA		2.858.873.618,435	3.005.478.146,641	(146.605)	(4,88)
31						



(L E G I S L A T I F)

DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAT

Judul Laporan : N E R A C A

11 - 01

Per : 31 Desember 2001 (Audited)

Laporan : 021

No. Baris	Keterangan	Kode Laporan	TAHUN BERJALAN (Desember 2001)	TAHUN LALU (Des 2000 Audited)	Perubahan (a-b)	
					Rp. (Juta)	%
32						
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
33	Kewajiban Jangka Pendek					
34	Kewajiban Kepada Pemerintah					
35	Kewajiban Pajak dan lain-lain	027	(178.888.323,352)	(6.440.616,215)	6.441	-
36	Biaya yang masih harus dibayar	027	(6.945.387,183)	(617.379.409,112)	(438.491)	(71,02)
37	Hutang jangka panjang yg jatuh waktu 1 th.	030	(185.833.710,535)	(6.945.387,183)	(0)	-
38	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			(630.765.412,510)	(444.932)	(70,54)
39						
40	Kewajiban jangka panjang	030	(3.553.312,315)	(10.498.699,498)	6.945	-
41						
42	Pendapatan ditangguhkan	035	(72.209.461,142)	(8.642.063,636)	63.567	735,56
43						
44	E K U I T A S					
45	Penyertaan Pemerintah	033				
46	Laba tahun berjalan	033	(3.301.961,164,636)	(2.303.877,003,538)	998.084	43,32
47	Laba ditahan	033	(159.142.338,371)	223.260.905,694	382.403	(171,28)
48	Selish Penilaian Kembali					
49						
50	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		(3.536.866,276,464)	(2.730.522,273,488)	806.344	29,53
51						
52	REKENING KORAN ANTAR UNIT OPERASI					
53						
54	Rekening koran dikonfirmasi	285.0	632.275.792,335	(362.911,117,452)	(994.287)	(274,66)
55	Rekening koran belum dikonfirmasi	285.0	231.550.576,229	87.055,244,299	(144.495)	165,98
56						
57						
58	JUMLAH REKENING KORAN ANTAR UNIT OPERASI		863.826.368,564	(274.955,873,153)	(1.138.782)	(414,17)
59						
60	JUMLAH KEWAJIBAN, EKUITAS & R/K		(2.858.873,618,435)	(3.005,478,146,641)	(146.605)	(4,38)

Note : (a) Lihat index kode laporan untuk mengetahui isi setiap perkiraan

(b) Untuk selisih saldonya disajikan dalam jutaan rupiah

MENGETAHUI :
BPXP PERWAKILAN PROP JAWA BARAT
PENGENDALI TEKNIS.

Cirebon, 22 Feb 2002
KEU DOH JAWA BAGIAN BARAT
MANAGER

Drs. SHIN WAN

F.X. SURIPTO

Lampiran 4

Laporan Community Development PT Pertamina DOH

Jawa Bagian Barat Tahun 2001

COMMUNITY DEVELOPMENT - DOH JBB
TAHUN 2001

VIII
CASH

NO.	DAERAH	PROGRAM					JUMLAH	KETERANGAN
		Sarana Ibadah	Pend & O.R.	PHBI & Nas	Sosial			
1	KOTA CIREBON	2,500,000	4,000,000	500,000	20,750,000	27,750,000		
2	KAB.CIREBON	1,000,000	3,600,000	18,500,000	11,905,000	35,005,000		
3	KAB.INDRAMAYU	3,250,000	13,550,000	2,150,000	42,250,000	61,200,000		
4	KAB.SUBANG	7,600,000	4,500,000	500,000	11,250,000	23,850,000		
5	KAB.MAJALENGKA	1,000,000	1.000.000	-	8,250,000	10,250,000		
6	KAB.KARAWANG	1,000,000	-	500,000	4,500,000	6,000,000		
7	KAB.BEKASI	-	3,000,000	-	34,650,000	37,650,000		
8	KOTA BEKASI	-	-	-	221,000,000	221,000,000 *)		
8	KOTA BANDUNG	-	-	-	3,000,000	3,000,000		
9	KAB. KUNINGAN	-	-	-	9,000,000	9,000,000		
	JUMLAH	16,350,000	29,650,000	22,150,000	366,555,000	434,705,000		

CD-2001.XLS/HUMAS/CD

*) Bantuan perbaikan jalan Perjuangan sebesar Rp. 221.000.000,- diberikan ke Pemda dalam bentuk Cash.
PERBAIKAN JALAN :

1 KAB. BEKASI

Rp. 246.280.690,-

Lampiran 5

Laporan Laba Rugi PT Pertamina DOH Jawa Bagian

Barat Tahun 2002

DAERAH OPERASI PULU JAWA BARAT

Judul : LABA RUGI (TERMASUK GAS JATIM)
Periode : 01 Januari S/D 31 Desember 2002 (Audited)

No Baris	Nama Rekening	Kode Laporan	TAHUN BERJALAN (Des 2002 Audited)	TAHUN LALU (Des 2001 Audited)		Perubahan (a - b) Rp.(juta)	%
	P E N D A P A T A N						
01	Penjualan dalam negeri BBM	002					
02	Penggantian biaya BBM dari pemerintah	003					
03	Penjualan dalam negeri bukan BBM	004	(5,017,287,949,845)	(6,327,012,345,156)	(1,309,724)	(21)	
04	Eksport minyak mentah	005A	(180,395,398,886)	-	180,395	#DIV/0!	
05	Eksport Hasil Minyak	005B					
06	Eksport L N G	005C					
07	Retensi dari Kontrak Bagi Hasil	006					
08	Lain - lain	007	(15,860,562,958)	(16,222,409,632)	(362)	(2)	
09	Jumlah Pendapatan		(5,213,543,911,689)	(6,343,234,754,787)	(1,129,691)	(18)	
	BIAYA - BIAYA						
10	Pembelian Minyak Mentah/ Hasil Minyak/ Gas	008	1,419,199,646,507	2,100,898,950,095	(681,699)	(32)	
11	Eksplorasi	009	8,731,563,791	2,491,624,747	6,240	250	
12A	P r o d u k s i	009	779,363,909,525	886,510,251,752	(107,146)	(12)	
12B	Mitra Usaha (PT. Radiant Energi Sukatani)	009	9,065,980,595	-	9,066	#DIV/0!	
13	P e n g o l a h a n	009					
14	Pembekalan Dalam Negeri	009					
15	Pengangkutan Laut dan Telekomunikasi	009					
16	Selish Kurs	010A	114,711,063,569	(124,994,782,148)	239,706	(100)	
17	B u n g a	011	2,122,654,513	2,122,654,511	0	0	
18	Penyusutan, Deplesi dan Amortisasi	022	156,068,707,574	174,244,891,195	(18,176)	(10)	
19	Jumlah Biaya		2,489,263,526,075	3,041,273,590,152	(552,010)	(18)	
	Lab a / R u g i		(2,724,280,385,614)	(3,301,961,164,636)	(577,681)	(17)	

MENGETAHUI :
BPKE PROP. JAWA BARAT



ABDUL MU'MIN

CIREBON, FEBRUARI 2003
MANAGER KEUANGAN DOH JBB



F.X. S. RIPTO

Lampiran 6

Laporan Neraca PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat

Tahun 2002

Judul Laporan : N E R A C A
 Per : 31 Desember 2002 (Audited)

II - 01
 Laporan : 021

No. Baris	Keterangan	Kode Laporan	TAHUN BERJALAN (Des 2002 Audited)	TAHUN LALU (Des 2001 Audited)	Perubahan (a-b) Rp. (Juta)	%
1	AKTIVA					
2	AKTIVA LANCAR					
3	Kas dan Bank	029	4,913,075,289	6,108,041,990	(1,195)	(19.56)
4	Surat-surat Berharga	029	-	-	-	-
5	Piutang Dagang	025	571,098,607,828	789,740,394,372	(228,642)	(28.59)
6	Penyisihan piutang dagang	025	(145,481,350,655)	(29,967,165,718)	(115,514)	385.47
7	Piutang lain-lain	025	15,732,411,392	6,600,924,209	9,131	138.34
8	Penyisihan piutang lain-lain	025	-	(311,756,020)	312	(100.00)
9	P E R S E D I A N					
10	Minyak mentah dan hasil minyak	024	26,906,416,647	33,599,263,305	(6,693)	-
11	M a t e r i a l	023	104,538,093,319	62,358,918,040	42,179	67.64
12	Pembayaran dimuka	025	8,089,002,460	3,909,529,110	4,179	106.90
13	JUMLAH AKTIVA LANCAR		585,796,256,279	882,038,149,288	(296,242)	(33.59)
14	Investasi					
15	AKTIVA TETAP					
16	Eksplorasi					
17	Produksi					
18	P e n g o l a h a n	022	3,143,451,602,349	3,115,169,242,022	28,282	0.91
19	LNG	022	-	-	-	-
20	Pembekalan dan pemasaran dalam negeri	022	-	-	-	-
21	Perkapalan kebandaran dan Komunikasi	022	-	-	-	-
22	Lain-lain	022	-	-	-	-
23						
24	Akumulasi Depresiasi dan Deplesi					
25	Nilai Buku Aktiva Tetap	022	(1,477,251,371,466)	(1,325,473,175,966)	151,778	11.45
26	Pekerjaan dalam pelaksanaan (WIP)	022	1,666,200,230,883	1,789,696,066,055	(123,496)	(6.90)
27	JUMLAH AKTIVA TETAP		385,547,544,259	127,186,516,530	258,361	203.14
28			2,051,747,775,142	1,916,882,582,585	134,865	7.04
29	Aktiva lain-lain					
30	JUMLAH AKTIVA	026	31,253,787,743	59,952,886,562	(28,699)	(47.87)
31			2,668,797,819,164	2,858,873,618,435	(190,076)	(6.65)



DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAT

Judul Laporan : N E R A C A

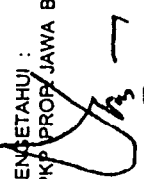
II - 01


Per : 31 Desember 2002 (Audited)

Laporan : 021

No. Baris	Keterangan	Kode Laporan	TAHUN BERJALAN (Des 2002 Audited)	TAHUN LALU (Des 2001 Audited)	Perubahan (a-b)	
					Rp. (Juta)	%
32	Kewajiban Jangka Pendek					
33	Kewajiban Kepada Pemerintah					
34	Kewajiban Pajak dan lain-lain	027	(251.459.075,820)	(178.888.329,352)	72.571	40,57
35	Biaya yang masih harus dibayar	027	(3.553.312,315)	(6.945.387,183)	3.392	-
36	Hutang jangka panjang yg jatuh waktu 1 th.	030	(255.012.388,135)	(185.833.710,535)	69.179	37,23
37	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
38						
39						
40	Kewajiban jangka panjang	030		(3.553.312,315)	3.553	-
41						
42	Pendapatan ditangguhkan	035	(6.838.222,635)	(72.209.461,142)	(65.371)	(90,53)
43						
44	E K U I T A S					
45	Penyertaan Pemerintah	033				
46	Laba tahun berjalan	033	(2.724.280.385,614)	(3.301.961.164,636)	(577.681)	(17,50)
47	Laba ditahan	033	(258.708.085,315)	(159.142.338,371)	99.566	62,56
48	Selisih Penilaian Kembali					
49						
50	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
51			(2.989.826.693,564)	(3.536.866.276,464)	(547.040)	(15,47)
52						
53	REKENING KORAN ANTAR UNIT OPERASI					
54						
55	Rekening koran dikonfirmasi	285.0	663.263.333,094	632.275.792,335	(30.988)	4,90
56	Rekening koran belum dikonfirmasi	285.0	(87.222.070,559)	231.550.576,229	318.773	(137,67)
57						
58	JUMLAH REKENING KORAN ANTAR UNIT OPERASI					
59			576.041.262,535	863.826.368,564	287.785	(33,32)
60	JUMLAH KEWAJIBAN, EKUITAS & R/K					
			(2.668.797.819,164)	(2.858.873.618,435)	(190.076)	(6,65)
			(0)	0		

Note : (a) Lihat index kode laporan untuk mengetahui isi setiap perkiraan
 (b) Untuk selisih saldonya disajikan dalam jutaan rupiah

MENGETAHUI :
 BPKP PROF. JAWA BARAT

 ABDUL MU'MIN

CIREBON, FEBRUARI 2003
 MANAGER KEUANGAN DOH JAWA BARAT

 F.X. SURIPTO

Lampiran 7

Laporan Community Development PT Pertamina DOH

Jawa Bagian Barat Tahun 2002

COMMUNITY DEVELOPMENT - DOH JBB
TAHUN 2002

VIII

CASH

NO.	DAERAH	PROGRAM					JUMLAH	KETERANGAN
		Sarana Ibadah	Pend & O.R.	PHBI & Nas	Sosial			
1	KOTA CIREBON	0	1,650,000	1,000,000	23,850,000	26,500,000		
2	KAB.CIREBON	0	4,450,000	3,750,000	31,800,000	40,000,000		
3	KAB.INDRAMAYU	4,850,000	18,405,000	500,000	38,990,000	62,745,000		
4	KAB.SUBANG	5,727,500	6,740,000	6,400,000	18,400,000	37,267,500		
5	KAB.MAJALENGKA	7,600,000	675,000	1,250,000	7,390,000	16,915,000		
6	KAB.KARAWANG	7,500,000	0	3,800,000	11,875,000	23,175,000		
7	KOTA. BEKASI	0	-	-	300,000,000	300,000,000 *		
8	KAB. BEKASI	5,137,500	3,000,000	6,050,000	313,462,500	327,650,000		
9	KAB.KUNINGAN	0	600,000	-	1,140,000	1,740,000		
	JUMLAH	30,815,000	35,520,000	22,750,000	746,907,500	835,992,500		

CD-2002-SD-06.XLS/HUMAS/CD-2002

*) Bantuan jalan Perjuangan sebesar Rp.300.000.000 anggaran th.2002 (accrual) Pelaksanaan bulan Januari th 2003.

PERBAIKAN JALAN :
 KABUPATEN BEKASI : Rp. 1,334,498,000
 KABUPATEN KARAWANG : Rp. 1,081,751,000
 Rp. 2,416,249,000

Lampiran 8

Laporan Laba Rugi PT Pertamina DOH Jawa Bagian

Barat Bulan Januari-September 2003



(P E T R O L I U M)
DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAT

Judul : LABA RUGI (TERMASUK GAS JATIM) I - 01
 Periode : 01 JANUARI 2003 S/D 16 SEPTEMBER 2003 (AUDITED) Laporan : 001

NO.	NAMA REKENING	KODE LAPORAN	TAHUN BERJALAN SEPTEMBER 2003	TAHUN LALU		PERUBAHAN
				SEPTEMBER 2002	RUPIAH	
PENDAPATAN :						
1	Penjualan Dalam Negeri BBM	002				
2	Penggantian Biaya BBM oleh Pemerintah	002				
3	Penjualan DN dr Hsl Minyak Lain	004	(2,939,480,838,894)	(3,982,219,900,731)	1,042,739,061,837	(26)
4	Ekspor Minyak Mentah	005A	(706,159,216,284)	0	(706,159,216,284)	0
5	Ekspor Hasil Minyak	005B				
6	Ekspor LNG	005C				
7	Retensi LNG	006A				
8	Retensi Dr Kontrak Bagi Hasil	006B	(274,150,810)	(323,501,441)	+9,350,631	(15)
9	Pendapatan Bunga	007A		(11,670,137,609)	4,768,936,791	(41)
10	Pendapatan lain-lain	007B				
11	Sub Total		(3,652,815,406,806)	(3,994,213,539,781)	341,398,132,975	(9)
BIAYA :						
12	Biaya Eksplorasi	009	1,888,478,247	7,295,121,354	(5,406,643,107)	(74)
13	Biaya Produksi	009	524,140,252,394	551,562,203,019	(27,421,950,625)	(5)
14	Biaya Pengolahan	009				
15	Biaya Pembekalan Dalam Negeri	009				
16	Biaya Perkapalan	009				
17	Pembelian Minyak Mentah dan Hasil Minyak	008	761,803,616,515	1,213,889,419,462	(452,085,802,947)	(37)

201



DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAT

1 - 02

Laporan : 001

Judul : LABA RUGI (TERMASUK GAS JATIM)
 Periode : 01 JANUARI 2003 S/D 16 SEPTEMBER 2003 (AUDITED)

NO.	NAMA REKENING	KODE LAPORAN	TAHUN BERJALAN SEPTEMBER 2003	TAHUN LALU SEPTEMBER 2002	PERUBAHAN	
					RUPIAH	%
18	Biaya Umum & Administrasi	010	22,801,834,506	109,302,056,576	(86,500,222,070)	(79)
19	Selisih Kurs	010A	1,088,318,409	1,591,990,885	(503,672,476)	(32)
20	Biaya Bunga	011	106,026,175,074	115,202,609,741	(9,176,434,667)	(8)
21	Biaya Depresiasi, Depleksi & Amortisasi	022				
22	Biaya lain-lain	013				
23	Biaya Anak Perusahaan					
24	PENGURANGAN DARI LNG :					
24	Bagian Pemerintah	009	0	0	0	0
25	Bagian Kontraktor					
26	Pendapatan, Yang Ditanggihkan					
27	Sub Total		1,417,748,675,145	1,998,843,401,037	(581,094,725,892)	(29)
28	(Laba)/ Rugi sebelum Bag. Pemerintah		(2,235,066,731,661)	(1,995,370,138,744)	(239,696,592,917)	12
29	Hak Minoritas		0	0	0	0
30	Bagian Pemerintah / Pajak		0	0	0	0
31	Sub Total		(2,235,066,731,661)	(1,995,370,138,744)	(239,696,592,917)	12
32	(Laba)/ Rugi sesudah Pajak					

Mengetahui :
 BPKP Perwakilan Bandung
 Kepala Bidang Akuntansi Negara

Eko Moeljono, Ak

Cirebon, Nopember 2003
 General Manajer DOH JBB

Subarkah Kustowo

Lampiran 9

Laporan Neraca PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat

Bulan Januari-September 2003

NOMOR BARIS	NAMA REKENING	KODE LAPORAN	TAHUN BERJALAN SEPTEMBER 2003	TAHUN LALU DESEMBER 2002	PERUBAHAN	
					RUPIAH	%
1	AKTIVA LANCAR					
2	Kas dan Bank	029	4,348,084,201	4,913,075,289	(564,991,088)	(11)
3	Deposito	029	0	0	0	0
4	Piutang Dagang	025	1,460,567,899,435	571,098,607,828	889,469,291,607	156
5	Penyisihan Piutang Dagang	025	(58,148,333,565)	(145,481,350,555)	87,333,017,090	(60)
6	Piutang Lain	025	62,873,177,390	8,834,121,151	54,039,056,239	612
7	Penyisihan Piutang	025	(403,378,598)		(403,378,598)	0
8	Persediaan :					
9	Persediaan Minyak Mentah dan Produk	024	29,342,489,495	26,906,416,647	2,436,072,848	9
10	Persediaan Material	023	70,545,713,284	104,538,093,318	(33,992,380,034)	(33)
11	Pembayaran Dimuka	025	11,020,485,716	14,987,292,701	(3,966,806,985)	(26)
12	JUMLAH AKTIVA LANCAR		1,580,146,137,358	585,796,256,279	994,349,881,079	170
13	Investasi	026	0			
14	AKTIVA TETAP					
15	Eksplorasi dan Produksi	022	3,442,939,256,771	3,143,451,602,349	299,487,654,422	10
16	Pengolahan	022	0	0	0	0
17	PPDN	022	0	0	0	0
18	PKK	022	0	0	0	0
19	LNG	022	0	0	0	0
20	Lain-lain	022	0	0	0	0
21	Akumulasi, Depresiasi dan Deplesi	022	(1,575,115,762,624)	(1,477,251,371,466)	(97,864,391,158)	7
22	NILAI BUKU AKTIVA TETAP		1,867,823,494,147	1,666,200,230,883	201,623,263,264	12
23	Pekerjaan Dalam Pelaksanaan	022	364,838,745,238	385,547,544,259	(20,708,799,021)	(5)
24	JUMLAH AKTIVA TETAP		2,232,662,239,385	2,051,747,775,142	180,914,464,243	9
25	Aktiva Lain-lain	026	28,423,880,184	31,253,787,743	(2,829,907,559)	(9)
26	JUMLAH AKTIVA		3,841,232,256,927	2,668,797,819,164	1,172,434,437,763	44



DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAI

Judul : N E R A C A II - 01 B
 Periode : 16 SEPTEMBER 2003 (AUDITED) Laporan : 021

NOMOR BARIS	NAMA REKENING	KODE LAPORAN	TAHUN BERJALAN SEPTEMBER 2003	TAHUN LALU DESEMBER 2002	PERUBAHAN	
					RUPIAH	%
27	KAWAJIBAN DAN EKUITAS :					
28	<u>KAWAJIBAN JANGKA PENDEK :</u>					
29	Hutang	027	(131,583,791,397)	(137,701,611,392)	6,117,819,995	(4)
30	Hutang Kepada Pemerintah	032	0	0	0	0
31	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	027	(639,392,688,121)	(117,310,776,743)	(522,081,911,378)	445
32	Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo 1 Tahun	030	0	0	0	0
33	Pendapatan Yang Ditangguhkan	035	(6,736,773,024)	(6,838,222,635)	101,449,611	(1)
34	JUMLAH KAWAJIBAN JANGKA PENDEK		(777,713,252,542)	(261,850,610,770)	(515,862,641,772)	197
35	Kewajiban Jangka Panjang	030	0			
36	<u>EKUITI :</u>					
37	Penyertaan Pemerintah	033	0			
38	Penyesuaian Mata Uang Asing					
39	(Laba)/Rugi Tahun Berjalan	033	(2,235,066,731,661)	(2,724,280,385,614)	489,213,653,953	(18)
40	(Laba) Yang ditahan	033	(3,064,925,853,429)	(258,708,085,315)	(2,806,217,768,114)	1,085
41	JUMLAH EKUITI		(5,299,992,585,090)	(2,982,988,470,929)	(2,317,004,114,161)	78
42	JUMLAH KAWAJIBAN DAN EKUITAS		(6,077,705,837,632)	(3,244,839,081,699)	(2,832,866,755,933)	87
43	REKENING KORAN ANTAR UNIT OPERASI :					
44	Rekening Koran Dikonfirmasikan	028	2,230,238,370,958	663,263,333,094	1,566,975,037,864	236
45	Rekening Koran Belum Dikonfirmasikan	028	6,235,209,747	(87,222,070,559)	93,457,280,306	(107)
46	Agreed Unresponded		0			
47	Pos Penutup		0			
48	JUMLAH R/K ANTAR UNIT OPERASI		2,236,473,580,705	576,041,262,535	1,660,432,318,170	288
49	JUMLAH KAWAJIBAN, EKUITAS, DAN R/K		(3,841,232,256,927)	(2,668,797,819,164)	(1,172,434,437,763)	44
50	BALANCE TEST =====>		0	0	0	0

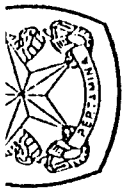
Mengetahui :
 BPKP Perwakilan Bandung
 Kepala Bidang Akuntansi Negara

Cirebon, Nopember 2003
 General Manajer DOH JBB

Lampiran 10

Laporan Laba Rugi PT Pertamina DOH Jawa Bagian

Barat Bulan Desember 2003



**PERIAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
(PERTAMINA)
DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAT**

Judul : LABA RUGI (TERMASUK GAS JATIM)
Periode : 17 September s/d 31 Desember 2003 PERIOD 14 (AUDITED)

Laporan : 1 - 01
001

NO.	NAMA REKENING	KODE LAPORAN	TAHUN BERJALAN 17-09 s/d 31-12-2003	TAHUN LALU 17-09 s/d 31-12-2002	PERUBAHAN	
					RUPIAH	%
1	PENDAPATAN :					
2	Penjualan Dalam Negeri BSM	002				
3	Revisi/Perubahan Biaya BSM dan Pemeliharaan	002				
4	Penjualan DN dr Hsl Minyak Lain	004	(1.319.531.627,300)	(1.463.375.552,038)	143.844.024,738	(10)
5	Ekspor Minyak Mentah	005A	(565.311.301,415)	(180.355.398,886)	(384.915.902,529)	213
6	Ekspor Hasil Minyak	005B				
7	Ekspor LNG	005C				
8	Retensi LNG	005A				
9	Retensi Dr. Kontrak Bagi Hasil	006B				
10	Pendapatan Bunga	007A	(92.853,899)	(139.049,954)	55.185,995	(40)
	Pendapatan lain-lain	007B	(9.835,515,594)	(4.466.947,545)	(5.248.563,149)	113
11	Sub Total		(1.894.662.308,398)	(1.648.397.048,454)	(246.265.259,944)	15
12	BIAYA :					
13	Biaya Eksplorasi	009	1.535.438,449	2.546.706,106	(1.010.267,657)	(40)
14	Biaya Produksi	009	253.218.413,900	229.933,717,961	23.284.696,139	11
15	Biaya Pengeolaan	009				
16	Biaya Pembekalan Dalam Negeri	009				
17	Pembelian Minyak Mentan dan Hasil Minyak	008	368.377,535,003	407.240,383,573	(38.862,848,570)	(10)
	Inventory Changes	008	7.686.324,801	5.992.646,559	1.693.678,242	15



(P E R T A M I N A)
DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAT

Judul : LABA RUGI (TERMASUK GAS JATIM)

Periode : 17 September S/D 31 Desember 2003 PERIOD 14 (AUDITED)

Laporan : 1 - 91 / 001

NO.	NAMA REKENING	KODE LAPORAN	TAHUN BERJALAN 17-09 s/d 31-12-2003	TAHUN LALU 17-09 s/d 31-12-2002	PERUBAHAN	
					RUPIAH	%
18	Biaya Umum & Administrasi	010				
19	Selisir Kurs	010A	(29.726.265,417)	33.457.393,541	(63.183.659,999)	(193)
20	Biaya Bunga	011	0	319.107,566	(319.107,566)	(100)
21	Biaya Depresiasi, Depleksi & Amortisasi	022	51.754.699,747	45.520.039,709	6.244.660,038	14
22	Biaya lain-lain	013				
23	Biaya Anak Perusahaan					
24	PENGURANGAN DARI LNG :					
24	Bagian Pemerintah					
25	Bagian Kontraktor	009	0	0	0	0
26	Pendapatan Yang Ditangguhkan					
27	Sub Total		652.857.346,453	726.035.195,104	(73.177.848,651)	(10)
28	(Laba)/ Rugi sebelum Bag. Pemerintah		(1.241.804.961,945)	(922.361.853,349)	(319.443.108,596)	35
29	Hak Minoritas		0	0		
30	Bagian Pemerintah / Pajak					
31	Sub Total		0	0	0	0
32	(Laba)/ Rugi sesudah Pajak		(1.241.804.961,945)	(922.361.853,349)	(319.443.108,596)	35

Mengetahui,
BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang Akuntan Negara

Cirebon, Juli 2004
Pjs. General Manager DOH JBB

Eko Moeliono, Ak

Khozim Sanugi

Lampiran 11

Laporan Neraca PT Pertamina DOH Jawa Bagian Barat

Bulan Desember 2003



DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BAKAL

Judul : N E R A C A II - 01 - J
 Periode : 31 DESEMBER 2003 PERIOD 14 (AUDITED) Laporan : 021

NOMOR BARIS	NAMA REKENING	KODE LAPORAN	TAHUN BERJALAN DESEMBER 2003	TAHUN LALU (16 September 2003)	PERUBAHAN	
					RUPIAH	%
AKTIVA						
2	Kas dan Bank	029	1.711.147.063	4.348.024.201	(2.636.877.138)	(61)
3	Deposito	029	0	0	0	0
4	Piutang Dagang	025	797.713.430.152	1.460.567.399.435	(672.853.969.283)	(49)
5	Penyisihan Piutang Dagang	025	(2.319.365.445)	(58.140.333.565)	55.531.438.120	(35)
6	Piutang Lain	025	2.291.159.069	62.576.112.190	(60.394.953.121)	(95)
7	Penyisihan Piutang	025	(178.640.569)	(403.373.598)	224.733.029	0
8	Persediaan :	024	0	0	0	0
9	Persediaan Minyak Mentah dan Produk	024	21.345.520.766	29.342.489.455	(7.996.968.689)	(23)
10	Persediaan Material	024	74.116.311.234	70.545.713.234	3.571.097.950	5
11	Pembayaran Dimuka	025	12.429.443.223	11.020.485.716	1.408.957.507	13
12	JUMLAH AKTIVA LANCAR		897.107.005.523	1.579.949.072.158	(682.842.066.535)	(40)
AKTIVA TETAP						
13	Ekplorasi dan Produksi	022	3.739.433.202.399	3.442.939.255.771	296.493.945.519	8
14	Pengolahan	022	0	0	0	0
15	PPDN	022	0	0	0	0
16	PKK	022	0	0	0	0
17	LNG	022	0	0	0	0
18	Lain-lain	022	0	0	0	0
19	Akumulasi, Depresiasi dan Delesi	022	(1.637.777.007.444)	(1.575.115.762.621)	(62.661.244.823)	4
20	NILAI BUKU AKTIVA TETAP		2.100.656.194.945	1.867.823.494.147	232.832.700.798	13
21	Pekerjaan Dalam Pelaksanaan	022	540.529.249.478	364.838.745.238	175.690.504.240	42
22	JUMLAH AKTIVA TETAP		2.641.185.444.423	2.232.662.239.385	408.523.205.038	18
23	Aktiva Lain-lain	025	29.068.587.550	28.520.945.384	547.642.166	2
24	JUMLAH AKTIVA		3.567.361.037.496	3.841.232.256.927	(273.871.219.431)	(7)



DAERAH OPERASI HULU JAWA BAGIAN BARAT

Judul : N E R A C A
 Periode : 31 DESEMBER 2003 PERIOD 14 (AUDITED)

Laporan : 021
 II - 013

NOMOR BARIS	NAMA REKENING	KODE LAPORAN	TAHUN BERJALAN DESEMBER 2003	TAHUN LALU (16 September 2003)	PERUBAHAN	
					RUPIAH	%
27	KEWAJIBAN DAN EKUITAS :					
28	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :					
29	Hutang	027	(257.794,143,667)	(131,555,791,397)	(126,210,352,270)	33
30	Hutang Kepada Pemerintah	027	0	0	0	0
31	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	027	(417,884,863,805)	(639,392,688,121)	221,507,824,316	105
32	Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo 1 Tahun	030	0	0	0	0
33	Pendapatan Yang Ditangguhkan	035	(7,241,768,874)	(6,736,773,024)	(504,995,850)	7
34	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		(682,920,776,346)	(777,713,252,542)	94,792,476,196	(12)
35	Kewajiban Jangka Panjang	030	0	0	0	0
36	EKUITAS :					
37	Penyertaan Pemerintah	033	0	0	0	0
38	Penyesuaian Mata Uang Asing	032	(1,241,804,961,945)	(2,235,666,731,661)	993,861,769,716	44
39	(Laba)/Rugi Tahun Berjalan	033	408,201,692,549	(3,064,925,853,429)	3,473,127,545,978	(13)
40	(Laba) Yang ditahan					
41	JUMLAH EKUITI		(833,603,269,396)	(5,239,992,585,090)	4,466,389,315,694	(34)
42	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		(1,516,524,045,742)	(6,077,705,837,632)	4,561,181,791,890	(75)
43	REKENING KORAN ANTAR UNIT OPERASI :					
44	Rekening Koran Dikonfirmasikan	028	(2,050,836,991,754)	2,230,238,370,953	(4,281,075,362,712)	(192)
45	Rekening Koran Belum Dikonfirmasikan	029	0	5,235,209,747	(5,235,209,747)	(100)
46	Agreed Unresponded		0	0	0	0
47	Pos Penutup		0	0	0	0
48	JUMLAH R/K ANTAR UNIT OPERASI		(2,050,836,991,754)	2,236,473,580,705	(4,287,310,572,459)	(192)
49	JUMLAH KEWAJIBAN, EKUITAS, DAN R/K		(3,567,361,037,496)	(3,841,232,256,927)	273,371,219,431	(7)
50	BALANCE TEST		0	0	0	0

Mengetahui,
 BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat
 Kepala Bidang Akuntan Negara

Cirebon, Juli 2004
 Pjs. General Manager DCH JB

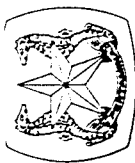
Eko Mcajiono, Ak

Khazim Sanusi

Lampiran 12

Laporan Community Development PT Pertamina DOH

Jawa Bagian Barat Bulan Desember 2003



**REALISASI COMMUNITY DEVELOPMENT - DOH JBB
TAHUN 2003**

CASH

NO.	DAERAH	PROGRAM						JUMLAH	KETERANGAN
		Sarana Ibadah	Pend & O.R.	PHBi & Nas	Sosial	Fasilitas			
1	KOTA CIREBON	1,600,000	12,950,000	17,500,000	8,300,000		40,350,000		
2	KAB.CIREBON	6,850,000	4,750,000	15,600,000	5,950,000	500,000	33,650,000		
3	KAB.INDRAMAYU	14,700,000	44,510,000	43,300,000	63,540,000		166,050,000		
4	KAB.SUBANG	13,000,000	6,100,000	22,250,000	23,680,000		65,030,000		
5	KAB.MAJALENGKA	2,750,000	1,000,000	10,000,000	8,390,000		22,140,000		
6	KAB.KARAWANG	5,750,000	2,000,000	15,500,000	22,275,000		45,525,000		
7	KAB.BEKASI	14,250,000	14,750,000	29,225,000	287,577,273		473,802,273		
8	KOTA BEKASI	-	-	2,000,000	-		2,000,000		
9	SIDOARJO	-	510,000	-	-		510,000		
10	JAKARTA	-	7,500,000	-	22,000,000		29,500,000		
11	KOTA BANDUNG	-	3,750,000	-	-		3,750,000		
	JUMLAH	58,900,000	97,820,000	155,375,000	441,712,273	500,000	882,307,273		

CD-2003-SD-12-REKAP.XLS/HUMAS/CD-2003

PERBAIKAN JALAN :

- KABUPATEN BEKASI
- KABUPATEN SUBANG

Rp. 2.134.804.100,-

Rp. 1.978.494.000,-

Rp. 4.113.298.100,-